

No. 203 Januari 2023

BaKTI News

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



MENGENAL ABLEISME

**APLIKASI SIMPALD UNTUK SANITASI AMAN
DI KABUPATEN PINRANG**

**PENDEKATAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN
BERBASIS MASYARAKAT**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTINews
MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.baktinews.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU

Editor Foto **ICHSAN DJUNAED**
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**
Sirkulasi **KHAIRIL ANWAR**

Redaksi

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10, Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 0411 832228 / 833383

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI News adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI News adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI News terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI News disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI News agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI News juga dapat diakses di website BaKTI: www.baktinews.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI News dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI News adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTI News is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI News aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI News is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.

BaKTI News is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI News is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI News is also provided in an electronic version that can be accessed on www.baktinews.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTI News is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI News

Contributing to BaKTI News

BaKTI News menerima artikel tentang praktik baik dan pembelajaran program pembangunan, hasil-hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI News akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI News tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTI News accepts articles about good practices and lesson learnt from development programs, applied research results, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. Our editor team will edit each article to ensure the language style and available space. BaKTI News does not provide fee for authors who contribute articles for this magazine.

MENJADI PELANGGAN BaKTI News

Subscribing to BaKTI News

Anda dapat mengisi formulir yang tersedia pada laman BaKTI News Online baktinews.bakti.or.id untuk dapat menerima majalah BaKTI News langsung ke email Anda setiap bulannya. Jika Anda tinggal di Makassar, Anda dapat mengambil majalah BaKTI News cetak di Kantor BaKTI setiap hari kerja.

You may fill out the form available on the BaKTI News Online page to be able to receive BaKTI News magazine directly to your email every month. If you live in Makassar, you can pick up the printed BaKTI News magazine at the BaKTI office on weekdays.

Daftar Isi

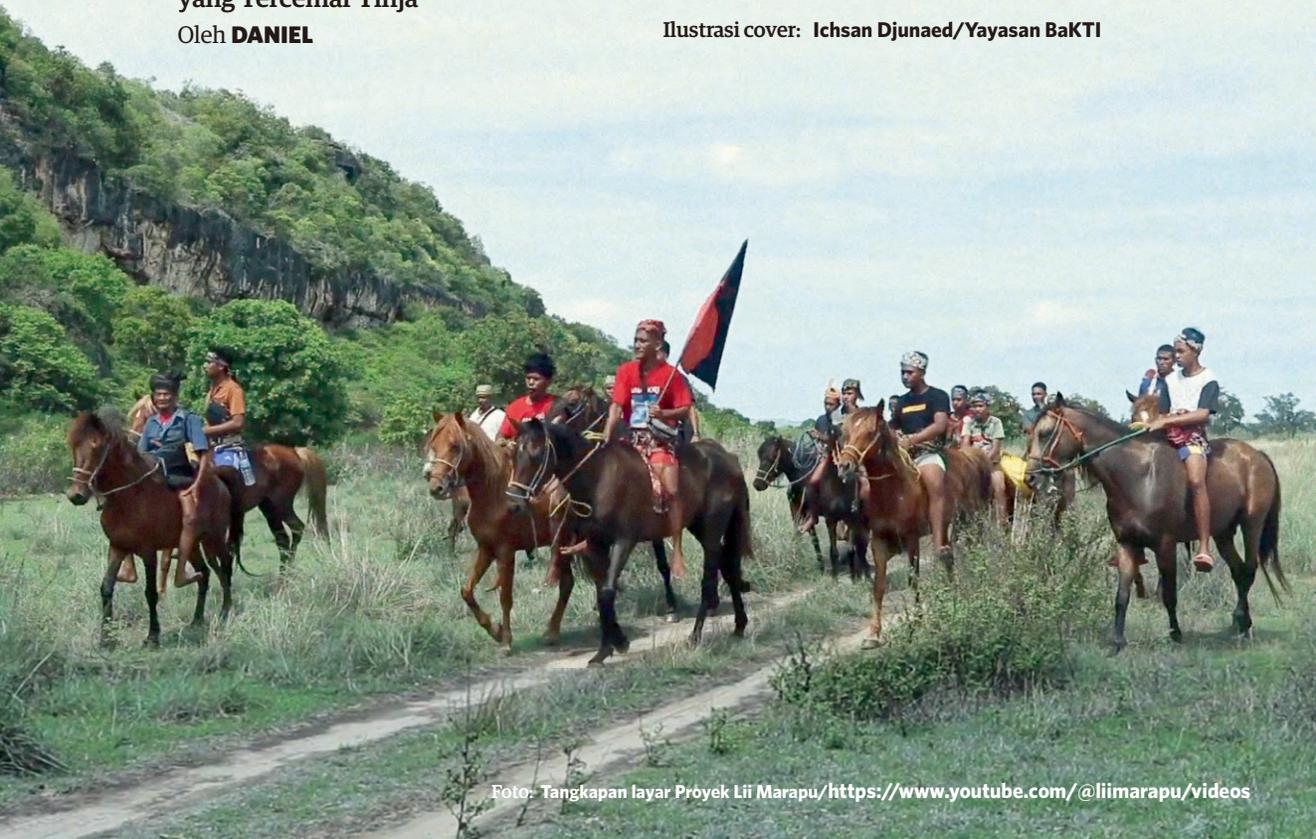
BaKTINews

Januari 2023

No. 203

- 1** Mengenal Ableisme
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 5** Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak Bagi Orang Difabel yang Menjadi Korban Kekerasan Bagian II (Selesai)
Oleh **ZAKIA & ISHAK SALIM**
- 9** Leave No One Behind
Oleh **RENALDO GIZIND**
- 11** Lii Marapu: Melestarikan Budaya Masyarakat Marapu melalui Pengarsipan Ritual dan Musik
Oleh **AHMAD FARID**
- 15** Aplikasi SIMPALD untuk Sanitasi Aman di Kabupaten Pinrang
Oleh **HALIA ASRIYANI**
- 21** Satu dari Empat Rumah Tangga di Indonesia Mengonsumsi Air Minum yang Tercemar Tinja
Oleh **DANIEL**
- 25** Bersiap untuk Bencana
Oleh **REDR Indonesia**
- 29** Ketika Perempuan dari Kasta Bangsawan dan Hamba di Sumba Bersiasat Memutus Rantai Perbudakan (Bagian 1)
Oleh **MARTHA HEBI**
- 33** Pendekatan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat
Oleh **JAPAN INITIATIVE, YAYASAN TIFA, & SUNAJI ZAMRON**
- 37** Tantangan Pengelolaan Keuangan Desa Pasca Pandemi COVID-19
Oleh **RUDY M. HARAHAP**
- 40** Diskusi IG Live Story @infobakti dan Podcast Basuara
- 41** Terbaru di Batukarinfo

Ilustrasi cover: Ichsana Djunaed/Yayasan BaKTI



MENGENAL ABLEISME

Oleh
M. GHUFRAN H. KORDI K.



A

bleisme (*ableism*) adalah prasangka atau perlakuan diskriminatif terhadap teman difabel. Istilah ableisme pertama kali digunakan secara tertulis pada 1986 oleh *Council of the London Borough Haringey* dalam siaran pers. Sebagai konsep, ableisme memang belum lama digunakan, namun sejarah abelis atau ableis telah ada jauh sebelumnya (Salim et al., 2022).

Ableisme dari kata *able* yang berarti mampu, sanggup, dapat, dan bisa. Jadi ableisme adalah sistem kepercayaan atau ideologi yang menempatkan dan menganggap orang-orang dengan disabilitas memiliki status yang lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang non disabilitas. Ableisme adalah diskriminasi dan prasangka sosial terhadap disabilitas yang dianggap sebagai orang-orang yang tidak mampu, tidak normal, dan cacat.

Istilah “Disabilitas” yang diadopsi di dalam sistem hukum nasional, misalnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU No. 8/2016), berasal dari kata yang sama *able* atau mampu, menjadi *disable* atau tidak mampu atau sering diterjemahkan menjadi penyandang cacat. Istilah disabilitas walaupun diterima secara luas, terutama dalam hukum positif, namun tetap menimbulkan masalah, karena menyebut dan menempatkan difabel atau disabilitas sebagai mereka yang tidak mampu.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengadopsi Konvensi mengenai Hak-Hak Orang dengan Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons With Disabilities, CRPD 2006*), yang sebelumnya diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui UU No. 19 Tahun 2011. Adopsi CRPD dalam hukum nasional sangat maju, karena CRPD adalah instrumen hak asasi manusia (HAM), sehingga Undang-Undang Penyandang Disabilitas juga menggunakan pendekatan HAM.

Konstruksi Sosial Penyandang Disabilitas

Ableisme dan abelis atau sikap merendahkan dan prasangka terhadap Disabilitas, yang menganggap mereka sebagai tidak mampu, cacat, invalid, dan tidak normal adalah hasil konstruksi sosial. Sebagai suatu konstruksi sosial, masalah cacat atau penyandang cacat dan normal adalah masalah yang direproduksi oleh ideologi, budaya, pengetahuan, maupun politik untuk kepentingan suatu golongan tertentu, yakni mereka yang merasa 'tidak cacat' dan 'normal' atau yang disebut sebagai normalisme (Fakih, 2002; 2011).

Untuk memahami ideologi normalisme ini, pertama yang harus dipahami tentang konsep 'cacat' dan 'normal'. Kecacatan pada dasarnya berkaitan dengan tidak berfungsinya salah satu bagian seseorang baik fisik maupun psikis. Tidak berfungsinya salah satu bagian dari fisik dan psikis seseorang sama sekali tidak ada kaitannya dengan mampu. Misalnya orang yang tidak mempunyai kaki atau kakinya mengalami kelumpuhan, bisa jadi memiliki kemampuan berpikir, berkomunikasi, mencipta dan sebagainya dibanding dengan orang yang memiliki kaki atau kaki tidak mengalami

Ilustrasi: Ichsan Djumaed/Yayasan BaKTI

kelumpuhan. Bahkan orang yang tidak mempunyai kaki atau kakinya mengalami kelumpuhan tidak berarti sama sekali dia tidak mampu 'berjalan' kalau memang hakikat berjalan adalah pindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang diperlukan adalah sarana dan prasarana yang memungkinkan dia dapat berpindah.

Demikian juga orang yang tuli tidak berarti 'tidak mampu' mendengar dan berkomunikasi, yang diperlukan adalah sarana dan prasarana yang memungkinkan dia dapat mendengar dan berkomunikasi, seperti alat bantu dengar, pembaca layar, atau bahasa isyarat. Apakah orang yang membutuhkan bantuan seperti alat bantu dengar untuk berkomunikasi dengan orang lain tersebut berarti tidak mampu dan tidak normal? Ini berarti, apa yang dikatakan bahwa orang yang tidak memiliki bagian dari alat tubuh atau tidak berfungsinya alat tubuh sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan kemampuan.

Kedua, adalah konsep 'normal' itu sendiri. Umumnya yang disebut orang normal adalah mereka yang memiliki anggota tubuh yang secara fisik bisa diobservasi, seperti mempunyai mata, tangan, kaki, dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya mengapa banyak jenis 'kerusakan' atau kelainan baik fisik maupun psikis yang tidak

mendapat predikat disabilitas atau penyandang cacat? Misalnya mereka yang mengalami kerusakan ginjal, jantung, tekanan darah, tetap dianggap 'normal'. Demikian juga mereka yang memiliki 'cacat mental dan moral' seperti pencuri atau koruptor, pelanggar hak asasi manusia, penindas, rentenir, dan sebagainya, mereka tidak peka terhadap penderitaan masyarakat, tetap dianggap normal. Jadi 'cacat' dan 'normal' adalah konstruksi sosial yang tidak selalu menggambarkan realitas sosial secara objektif. Konstruksi sosial ini dilanggengkan oleh kepentingan dari golongan yang menganggap diri mereka normal untuk membedakan diri dengan mereka yang dianggap tidak normal dan cacat (Fakih, 2002; 2011).

Bahasa dan Ableisme

Istilah *disable* atau tidak mampu, cacat, invalid, dan tidak normal mungkin tidak dipermasalahkan jika tidak menyebabkan diskriminasi, kekerasan, dan penyingkiran terhadap mereka yang disebut dengan istilah-istilah tersebut. Tetapi kenyataannya istilah-istilah tersebut melahirkan ableis atau sikap merendahkan disabilitas, hingga diskriminasi dan kekerasan terhadap disabilitas.



Ableisme dan ableis menganggap mereka yang disabilitas sebagai orang yang tidak mampu, cacat, invalid, dan tidak normal, berimplikasi pada nasib mereka yang dikategorikan sebagai tidak mampu dan tidak normal. Dengan kata lain pembagian cacat-normal ini ada yang diuntungkan dan ada yang disingkirkan.

Penamaan atau pengistilahan dengan menggunakan bahasa sebagai media komunikasi dengan segala konstruksi yang melingkupinya, menjadikan normal dan tidak normal bukanlah istilah yang netral. Apalagi penggunaan istilah dan pengetahuan mengenai normal dan tidak normal dikuasai oleh mereka yang menganggap dirinya normal. Dengan kekuatan data, analisis, dan argumentasinya, para ilmuwan dan pengambil kebijakan membuat istilah, mengartikan, mendefinisikan, dan mengkategorisasikan. Sebagai contoh definisi yang digunakan dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Undang-Undang tersebut sudah digantikan dengan Undang-Undang No. 8/2016). Di dalam undang-undang tersebut disebutkan, Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. UU ini menggunakan istilah cacat dan mereka adalah orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental. Cacat, kelainan fisik, dan kelainan mental adalah istilah yang umum digunakan dalam dunia kedokteran dan kesehatan.

Wacana kuasa dalam memaksakan normalitas berdasarkan pengetahuan biomedik telah mendasari pengetahuan yang menentukan relasi pencacatan. Normalisme menempatkan aspirasi biologi atau tubuh yang lengkap sebagai normal dan dengan demikian tampak lebih superior pada diri subjek yang tidak lengkap, cacat, atau abnormal telah menjadikan orang-orang normal sebagai 'aparatus' yang mengatur atau mengendalikan tatanan sosial kemasyarakatan.

Sementara mereka yang disebut sebagai tidak normal tidak mempunyai pengetahuan dan ruang yang cukup untuk memberikan masukan atau menyanggah istilah dan argumentasi yang digunakan dalam pembentukan suatu kebijakan. Di sisi lain, berbagai sarana dan prasarana yang diproduksi oleh manusia juga tidak memberikan akses dan ruang yang memadai untuk mereka yang disebut sebagai tidak normal.

Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Disabilitas

Ableisme dan ableis yang menganggap orang difabel sebagai orang yang tidak mampu, cacat, invalid, dan tidak normal, berimplikasi pada nasib mereka yang dikategorikan sebagai tidak mampu dan tidak normal. Dengan kata lain pembagian cacat-normal ini ada yang diuntungkan dan ada yang disingkirkan. Ableisme dan ableis melahirkan diskriminasi, stereotip atau pelabelan terhadap disabilitas, marjinalisasi dan pemiskinan, kekerasan, dan subordinasi.

Sebagai sebuah sistem kepercayaan atau pandangan, ableisme telah mengakar kuat dalam sistem pengetahuan dan sistem sosial. Pengetahuan mengenai disabilitas yang melahirkan kebijakan dan praktik sosial diskriminatif, yang oleh sebagian besar masyarakat menerimanya sebagai sesuatu yang terjadi secara alami. Karena itu, untuk mengubah kebijakan dan kehidupan sosial yang diskriminatif terhadap disabilitas, maka dibutuhkan kerja-kerja yang berbasis pengetahuan untuk merekonstruksi pengetahuan yang selama ini menempatkan disabilitas sebagai kelompok yang tidak mampu dan tidak normal.

Pengetahuan yang selama ini melahirkan dan mengokohkan ableisme dan ableis, perlu dan harus dikritisi dan diimbangi dengan pengetahuan baru yang tidak diskriminatif dan lebih adil. Ini perlu dilakukan karena pengetahuan yang berbasis ableisme dan sikap ableis bertentangan dengan hak asasi manusia. Tuhan juga menyatakan "sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (QS.95:4). Karena itu, manusia yang disabilitas dan non disabilitas mempunyai kedudukan sama, tidak hanya di dalam negara, tetapi juga di mata Tuhan. Jadi menjadi tugas manusia untuk mengubah kehidupan yang diskriminatif dan tidak adil terhadap manusia yang lain, yaitu disabilitas.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tentang Program INKLUSI-BaKTI dapat menghubungi info@bakti.or.id

AKSESIBILITAS DAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI ORANG DIFABEL YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN

Bagian II (Selesai)

Oleh **ZAKIA & ISHAK SALIM**



M

endampingi orang difabel yang menjadi korban kasus kekerasan membutuhkan pengetahuan dasar mengenai disabilitas dan prinsip-prinsip inklusif dalam penanganannya. Saya akan memulainya dengan sebuah cerita saat mendampingi seorang siswi netra yang mendapatkan perlakuan kekerasan verbal ketika mendaftarkan dirinya di sekolah negeri.

Cerita ini bermula di tahun 2018, Nabila, gadis buta berusia 15 tahun bertekad melanjutkan pendidikan di SMA reguler. Ia merasa telah cukup menempuh jenjang sekolah menengah pertama di Sekolah Luar Biasa. Ia mendaftar ke SMAN 11 Makassar dan lulus. Namun mengetahui Nabila adalah seorang difabel netra, kelulusannya ditanggguhkan. Pihak sekolah beranggapan ia tidak akan mampu



Ilustrasi: Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI

mengikuti pelajaran karena kebutaannya. Mereka juga khawatir keberadaan Nabila justru mengganggu siswa-siswi lainnya dalam proses belajar.

Tidak mudah menyerah, Nabila meminta tim Advokasi Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) untuk mendampingi-nya. Bersama-sama, mereka menemui Kepala Sekolah SMAN 11 untuk meminta dan

memberikan penjelasan terkait penolakan tersebut. Kepala sekolah memberikan respons positif terhadap diskusi yang dilakukan. Namun sayangnya beberapa guru justru sebaliknya. Mereka menganggap bahwa sekolah tersebut bukanlah tempat bagi anak buta seperti Nabila. Selain karena guru-guru yang tidak memiliki kemampuan khusus mengajar siswa difabel, fasilitas sekolah juga tidak memadai untuk itu.

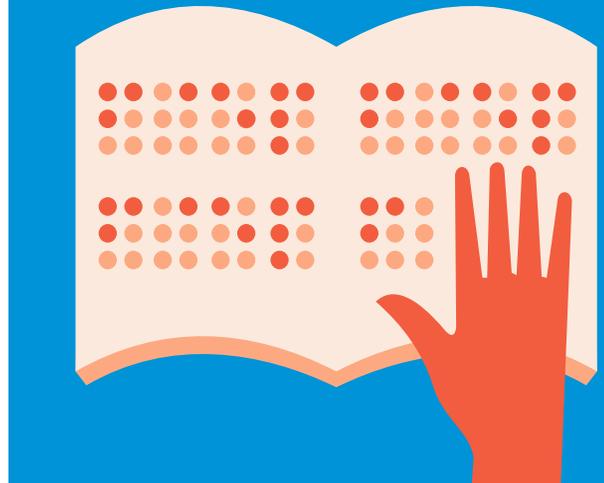
Nur Syarif Ramadhan yang saat itu mendampingi Nabila, menunjukkan alat (seperti HP bicara) dan aplikasi yang dapat mendukung siswa netra dalam belajar. Syarif yang juga seorang netra juga menceritakan bagaimana ia menggunakan peralatan tersebut dalam studinya dan dalam pekerjaannya di bidang advokasi bagi hak orang difabel.

Sayangnya, pengalaman itu tidak membuat guru-guru percaya pada kemampuan difabel dalam proses belajar mengajar. Mereka tetap menganggap sekolah luar biasa adalah sekolah terbaik bagi difabel. Asumsi bahwa belajar artinya menulis dengan pena dan membaca dengan mata masih sangat kuat. Diskusi menemui jalan buntu.

Advokasi kedua dilakukan, meski kini dengan cara yang sedikit lebih tegas. PerDIK menunjukkan posisinya dalam mendukung Nabila untuk bersekolah di SMAN 11 Makassar dan meyakini kemampuannya mengikuti pelajaran. Kritikan ditujukan kepada pihak sekolah melalui media, diskusi terkait Pendidikan Inklusi dilaksanakan dengan berbagai pihak dan audiensi dengan kepala dinas pendidikan kala itu menjadi jalan-jalan yang ditempuh untuk membuka pemahaman terkait hak semua orang dalam pendidikan tanpa terkecuali. Kritikan yang akhirnya menjadi sorotan bagi pihak sekolah sehingga memutuskan menerima Nabila dengan syarat ia harus mampu menunjukkan kemampuannya dalam mengikuti pelajaran selama tiga bulan pertama.

Di sekolah, Nabila menghadapi pertarungan lain dengan berbagai hambatan di dalam lingkungan pembelajaran. Sepanjang tahun, Nabila disibukkan berjuang membuktikan diri kepada guru-guru dan teman-teman sekolahnya. Nabila bertekad untuk tidak dianggap 'tak terlihat' oleh yang lain. Ia mengerjakan tugas dari guru-gurunya dengan berbagai macam cara seperti mengetik lalu mencetaknya atau dengan menghafal materi di depan guru. Beberapa guru menerima, namun ada juga yang menolak dan memintanya tetap menggunakan pena, misalnya untuk tugas menggambar atau matematika.

Perjalanan Nabila membuat perjalanannya menempuh pendidikan jadi lebih istimewa. Ia membuktikan kalau ia mampu bertahan bahkan berprestasi di tengah-tengah sikap prasangka dan diskriminasi di lingkungan sekolah.



Saat-saat seperti itulah dimulai perjuangan Nabila untuk dirinya sendiri. Meski sudah menjelaskan panjang lebar mengenai beragam aplikasi pembaca layar (JAWS, *Voice over*) yang digunakan difabel netra untuk membantu mereka dalam belajar dengan media HP, komputer atau laptop, namun ada kalanya advokasi itu menemui jalan buntu. Sehingga Nabila tetap membutuhkan bantuan orang lain dalam menulis atau menggambar di atas kertas putih untuk diserahkan sebagai tugas. Tentu saja ini membuat peran Nabila sebagai pelajar sedikit berkurang.

Advokasi dengan kekuatan diri sendiri terus Nabila lakukan setiap hari. Nabila juga menunjukkan bagaimana ia belajar, mengerjakan tugas dan berinteraksi dengan temannya di sekolah. Nabila bahkan membuktikan prestasinya di luar sekolah yang membuat

sekolahnya bangga. Pelan tapi pasti, perspektif baru mengenai orang difabel mulai terbentuk.

Guru-guru mulai memahami kemampuan siswanya dengan menyaksikan langsung perjuangan Nabila. Tiga tahun bersekolah di SMAN 11, Nabila akhirnya lulus dan melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin. Hal yang wajar bagi setiap siswa SMA untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan. Perjalanan Nabila membuat perjalanannya menempuh pendidikan jadi lebih istimewa. Ia membuktikan kalau ia mampu bertahan bahkan berprestasi di tengah-tengah sikap prasangka dan diskriminasi di lingkungan sekolah.

Cara Pandang Disabilitas

Memahami orang difabel secara benar dapat dilakukan dengan menggunakan model-model disabilitas yang memberikan cara pandang terhadap kompleksitas dan sejarah disabilitas. Secara singkat, model-model yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Pertama, model individual, merupakan cara pandang yang memusatkan persoalan bertumpu pada diri difabel. Model individual terdiri dari: *Pertama*, disabilitas sebagai penyakit adalah cara pandang yang melihat disabilitas sebagai masalah medis pada diri seseorang. Hal ini disebabkan karena adanya kerusakan atau kegagalan sistem tubuh sehingga menyebabkan keabnormalan. *Kedua*, disabilitas sebagai korban adalah cara pandang yang melihat disabilitas sebagai seseorang yang menderita dan mengalami kemalangan. Sehingga patut dikasihani. *Ketiga*, disabilitas sebagai balasan dari Tuhan adalah cara pandang yang melihat disabilitas sebagai akibat dari dosa difabel di masa lalu sehingga mendapatkan hukuman dari Tuhan.

Kedua, model sosial merupakan cara pandang yang memusatkan persoalan justru bertumpu pada aspek sosial. Bukan lagi pada individu disabilitasnya. Model sosial terdiri dari: *Pertama*, disabilitas sebagai fenomena

konstruksi sosial adalah cara pandang yang melihat bahwa persoalan disabilitas diakibatkan oleh masyarakat. Kerap kali lingkungan sosial-lah yang menciptakan dan melanggengkan stigma atas orang difabel. Sehingga setiap solusi yang berarti harus diarahkan sebagai perubahan sosial. Disabilitas sebagai budaya sosial adalah cara pandang yang melihat bahwa kehidupan dengan disabilitas membentuk budaya tertentu yang menampilkan disabilitas sebagai identitas tertentu. Untuk dapat memahami disabilitas dan mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapinya, perlu memahami identitas tersebut.

Ketiga, model relasi, merupakan perpaduan antara pendekatan individual (khususnya medik, tubuh dan psikis) dengan pendekatan sosial yang menuntun kita untuk memahami keduanya sebagai satu totalitas yang dihadapi orang difabel. Pendekatan relasional disabilitas ini yang memandu dunia menuangkan prinsip-prinsip disabilitas ke dalam dokumen konvensi Hak-Hak Disabilitas atau dikenal dengan nama *The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability* (UNCRPD).

Dalam kasus Nabila, model sosial disabilitas merupakan cara pandang yang memungkinkan proses advokasi terhadapnya dapat terjadi dan menggeser pandangan berbasis individual yang membuat guru-guru menolak keinginan Nabila mengambil haknya atas pendidikan yang setara. Bahkan secara lebih kuat, kita bisa menggunakan UNCRPD untuk membuktikan bagaimana negara melalui sekolah melanggar hak seseorang untuk meraih pendidikan dengan kualitas terbaik. (Selesai)

INFORMASI LEBIH LANJUT

Zakia, Pengurus Yayasan Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK)

dapat dihubungi melalui email : khyazakia22@gmail.com

Ishak Salim, Dewan Pembina Yayasan Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK)

dapat dihubungi melalui email : isangkilang@gmail.com

LEAVE NO ONE BEHIND

Oleh **RENALDO GIZIND**

Begitulah bunyi dari *Universal Declaration of Human Rights* (UHDR) pada pasal yang ke-1 yang diproklamirkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 lalu. Bunyi Pasal 1 dalam dokumen UHDR tersebut kini menjadi acuan dasar PBB dalam menetapkan tema peringatan hari HAM sedunia tahun 2021 yang berbunyi “Kesetaraan-Mengurangi ketidaksetaraan, memajukan hak asasi manusia”.

Tema HAM yang diambil PBB tahun ini disebut juga menyelaraskan dengan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*) 2030 dan dengan menggunakan pendekatan *Leave No One Behind* (tidak meninggalkan seorang pun) yang juga merupakan prinsip utama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut.

Secara implisit, pemilihan tema ini mengisyaratkan bahwa komitmen dunia untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan semakin kuat dalam hal menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan pendekatan yang humanis dan partisipatif.

Peluang dan Tantangan Zaman

Saat ini dunia telah memasuki era Revolusi Industri jilid ke-4 atau yang dikenal dengan istilah Revolusi Industri 4.0. Perubahan dalam Dunia industri ini kemudian melahirkan

perubahan-perubahan lainnya dalam berbagai aspek kehidupan manusia baik itu dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Dengan munculnya teknologi seperti kecerdasan buatan, *machine learning*, *big data*, dan *internet of thing* (IoT), manusia dituntut lebih adaptif, menyesuaikan dengan tuntutan zaman yang sedang dihadapi. McKinsey dalam studinya menyatakan bahwa 60% jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan dampak adanya otomatisasi.

Di Indonesia sendiri, masih menurut studi tersebut, sebanyak 51% lapangan pekerjaan akan hilang dampak dari adanya revolusi Industri 4.0 yang sedang kita masuki bertahap ini. Meskipun terdapat ancaman demikian, revolusi industri 4.0 juga dipercaya membawa peluang dalam mencapai tujuan SDG's di tahun 2030.

Salah satu target dalam SDG's adalah untuk mencapai negara tanpa kemiskinan. Dengan demikian, untuk memenuhi target tersebut di era yang semakin kompetitif ini, syarat utamanya adalah adanya SDM yang mampu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengarungi dunia yang “cerdas” nantinya.

Masalah Literasi dan Kesenjangan Pendidikan

Sayangnya Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah persoalan dalam hal kesiapan dan kematangan Sumber Daya Manusia.

Permasalahan ini tercermin dalam sisi input SDM yang memiliki tingkat literasi yang rendah dan masalah yang terjadi dalam proses penciptaan SDM berkualitas melalui sektor pendidikan.

Rendahnya tingkat literasi ini dijelaskan dalam studi yang dilakukan oleh PISA dan Indeks Alibaca yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Studi yang dilakukan oleh PISA pada 2019 lalu menunjukkan tingkat literasi Indonesia menempati posisi ke-62 dari total 70 negara.

Survei yang lain yang dilakukan oleh Kemendikbud di tahun yang sama mengenai Indeks Aktivitas Literasi dan Membaca (Alibaca) juga menunjukkan hasil Alibaca nasional berada pada titik yang rendah. Hasil survei tersebut menunjukkan hanya 9 provinsi yang masuk kategori sedang sementara 24 provinsi lainnya menunjukkan indeks yang rendah dan satu provinsi lagi berada di titik yang sangat rendah.

Literasi merupakan hal yang penting karena bermanfaat untuk pembangunan suatu negara. Dengan adanya tingkat literasi yang tinggi, pemahaman masyarakat akan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi modal awal yang cukup untuk bersaing baik itu dalam lingkup lokal maupun global. Sebaliknya, tingkat literasi yang rendah dikhawatirkan akan menjadi hambatan bagi SDM Indonesia untuk bersaing.

Apabila kita lebih terfokus lagi, Indonesia juga masih dihantui dengan adanya kesenjangan antara desa dan kota khususnya dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Padahal pendidikan memiliki fungsi penting dalam menyiapkan generasi muda untuk memiliki kemampuan agar dapat dapat memegang peranan di masa yang akan datang (Nasution, 2014).

Menurut studi yang dilakukan oleh Arifah (2019), disimpulkan bahwa dalam hal kesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas, desa memiliki kesempatan yang lebih rendah dibanding di Kota. Hal tersebut tercermin dalam tiga dimensi seperti sarana-

prasarana dan tenaga pendidik, dukungan lingkungan sekitar, dan capaian prestasi.

Contoh nyata di lapangan dari kesenjangan yang ada dapat kita lihat dalam potret pendidikan saat Pandemi COVID-19 mengharuskan kegiatan belajar-mengajar berlangsung secara daring atau dikenal dengan istilah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Saat itu, bagi mereka yang terkendala gangguan jaringan harus mencari tempat tinggi atau mungkin pergi menempuh jarak yang cukup jauh agar dapat bersekolah. Atau, bagi siswa yang belum memiliki *smartphone*, barangkali harus meminjam tetangganya terlebih dahulu agar dapat bersekolah.

Menghindari Terjadinya “Seleksi Alam”

Kesenjangan yang ada dalam proses input sumber daya manusia tersebut perlu disadari bersama sebagai sebuah tantangan nyata yang perlu dijawab dengan memberi perhatian terhadapnya. Akibat adanya permasalahan dalam proses input ini dikhawatirkan akan membuat Indonesia tertinggal dan tidak dapat bersaing dengan dunia global nantinya.

Terlebih lagi, kita tidak ingin kemajuan negara hanya dirasakan segelintir orang yang memiliki kesempatan sedangkan sisanya harus gugur akibat ‘seleksi alam’ karena tidak mampu beradaptasi. Dengan demikian, setiap pemangku kebijakan yang ada di Indonesia harus mengupayakan agar setiap orang mendapat kesempatan yang sama dalam proses peningkatan kualitas dirinya agar dapat menyongsong ‘dunia cerdas’ ini. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menyetarakan kualitas pendidikan di seluruh negeri.

Kerangka kerja untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dibangun haruslah didasarkan pada pemenuhan Hak Asasi Manusia berdasarkan prinsip kesetaraan dengan pendekatan yang lebih humanis, *leave no one behind*.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari

<https://geotimes.id/opini/leave-no-one-behind/>

LII MARAPU

MELESTARIKAN BUDAYA
MASYARAKAT MARAPU
MELALUI PENGARSIPAN
RITUAL DAN MUSIK

Oleh **AHMAD FARID**



Sekelompok pemuda terlihat berkuda pada hari yang cerah. Mereka mulai memacu kuda-kuda tersebut secara perlahan, lengkap dengan mengenakan aksesoris tertentu. Tak jauh dari lokasi berkuda tersebut, sekelompok orang lainnya khidmat dan khusyuk beribadah. Seekor ayam kampung, sirih, pinang, dan pernak-pernik kebutuhan ritual dipersiapkan. Seorang pria dengan raut wajah serius melantunkan doa-doa kepada Sang Pencipta.

Aktivitas tersebut merupakan salah satu cuplikan dari rangkaian ritual Marapu—sebuah kepercayaan dari sekelompok penghayat di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Cuplikan itu dapat dengan mudah disaksikan melalui kanal Youtube Lii Marapu Project. Adapun kanal ini merupakan bagian dari upaya advokasi *Sumba Integrated Development* (SID) dengan Marungga Foundation yang didukung Voice dalam meningkatkan akses sosial dan pendidikan bagi penghayat Marapu untuk memperkuat partisipasi politik mereka.

Direktur Eksekutif SID, Jesaya Sovianto Kila, mengatakan bahwa upaya mendorong pengarsipan sekaligus dokumentasi kepercayaan Marapu tersebut pada mulanya lahir dari kekhawatiran akan sejumlah aset budaya di Sumba, baik di Sumba Timur, Tengah, Barat, hingga Barat Daya mulai terkikis. Penyebabnya diduga adalah banyaknya budaya lain yang mulai menggerus budaya asli, serta kurang adanya kesinambungan transfer budaya yang optimal sehingga dapat diakses oleh generasi baru—alias anak muda. Bahkan, generasi muda cenderung berjarak dengan budaya asli yang ada di Sumba.

Berbekal kondisi tersebut, SID berkolaborasi dengan sejumlah lembaga mulai menginisiasi pelestarian budaya. Inisiatif tersebut diawali dengan melestarikan bahasa Kodi di Sumba Barat Daya. Di kawasan tersebut, SID beserta lembaga-lembaga terkait bekerja sama dengan beberapa sekolah untuk menghasilkan buku panduan mengenai bahasa Kodi dalam bentuk cetak dan digital. Buku tersebut berisi informasi bahasa Kodi yang diinventarisir serta dikurasi tim, yang memuat bahasa serta terjemahan bahasa Kodi, untuk dapat dipelajari pelajar di sekolah dasar.

“Ketika kami dalam proses itu, kami temukan bahwa memang kondisi budaya, salah satunya bahasa, kondisinya memang cukup memprihatinkan. Sementara untuk ketahanan bahasa, antara (skala) 1-10 itu mungkin berada pada angka 5. Jadi, sudah menuju ke kepunahan kalau tidak segera dilakukan langkah-langkah untuk melestarikan kembali, atau menghidupkan kembali,” kata pria yang akrab disapa Anto ini.

Pada masa tersebut SID sejatinya sudah sangat tergerak untuk melestarikan budaya-budaya di Sumba dalam skala luas. Namun, saat itu kondisi SID masih terbatas, sehingga diputuskan untuk melakukan sejumlah program yang ada dengan berbagai modal yang dimiliki. Hal ini tidak lepas dari visi misi SID sebagai organisasi yang salah satunya menggali budaya dan kearifan lokal di Sumba. Ikhtiar ini nantinya diharapkan dapat mendorong tumbuh dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis budaya lokal.

Dalam perjalanannya, kata Anto, SID memperoleh informasi bahwa Voice tengah membuka hibah *empowerment*. Berbekal informasi tersebut, SID mengajukan proposal program yang terfokus untuk merevitalisasi aset budaya Marapu di wilayah Sumba Timur melalui pemberdayaan pemuda, perempuan, dan lansia. Pemilihan Sumba Timur didasarkan bahwa wilayah Sumba sangat luas dan beragam. Selain itu, wilayah Sumba memiliki beragam budaya serta kearifan lokal. Karenanya, diputuskan untuk melakukan pelestarian budaya yang terfokus dengan harapan bahwa program ini pada perjalanannya dapat memantik gerakan serupa di kawasan lain.

Anto mengisahkan, dalam mengupayakan revitalisasi budaya penghayat Marapu, dirinya beserta tim terlebih dahulu melakukan asesmen. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aset budaya yang masih ada, serta untuk menginventarisir keadaan terkini. Selain itu, inisiatif tersebut berguna sebagai dasar dalam memberikan program pelestarian budaya yang tepat bagi masyarakat setempat.

Dari asesmen yang dilakukan, diketahui terdapat jarak antara generasi pendahulu dan anak muda dalam mengimplementasikan



kebudayaan. Jarak tersebut disebabkan oleh terhambatnya transfer pengetahuan yang terjadi. Ini lantaran kebudayaan Marapu cenderung diturunkan kepada generasi berikutnya secara lisan, sehingga beberapa aspek rinci kebudayaan tidak tercatat dengan baik. Selain itu, terdapat anggapan bahwa budaya akan berlanjut dengan sendirinya kepada generasi baru—semacam karunia yang hadir secara organik.

Melihat kondisi tersebut, SID mengupayakan program untuk membangkitkan budaya Marapu. Program ini dilengkapi dengan langkah mendokumentasikan setiap acara budaya yang digelar. Proses pendokumentasian dilaksanakan secara tertulis serta visual melalui video. Secara lebih rinci, dokumentasi tulisan berwujud buku secara fisik dan digital. Sedangkan video, diunggah melalui kanal YouTube Lii Marapu.

Bangkitkan Ingatan Budaya Masa Silam

Program-program yang dijalankan tak jarang memantik antusiasme masyarakat setempat. Lokakarya, pentas budaya, hingga diskusi yang dilakukan dihadiri warga dengan saksama. Bahkan, upaya ini juga membangkitkan ingatan akan budaya masa lampau yang telah lama tak terdengar. Apalagi, segala proses menghadirkan para generasi terdahulu yang berkecimpung

dengan budaya tersebut untuk memantik diskusi dengan anak-anak muda.

“Mereka (masyarakat) senang, karena melalui *event* tersebut diketahui ternyata di desa tersebut ada sekian ritual yang ada, dari kami lakukan *workshop* itu. Ada sejumlah ritual yang disampaikan waktu itu oleh tokoh-tokoh masyarakat. Jadi, ada diundang tokoh masyarakat, pemerintah desa, masyarakat sekitar, termasuk seniman waktu itu kami undang di tingkat desa, terus berbagi cerita di situ. Jadi mereka mulai menceritakan ritula mereka dahulu,” ujar Anto dalam menggambarkan proses program.

Berbagai ikhtiar yang dilakukan tersebut kemudian menghasilkan dokumentasi komprehensif mengenai musik dan ritual penghayat Marapu. Setidaknya, inisiatif tersebut berhasil memotret kebudayaan Marapu dengan rincian 13 aliran musik tradisional, serta 5 aliran ritual Marapu. Hal ini juga ditopang dengan membantu masyarakat untuk menambah alat-alat musik yang membantu kebudayaan Marapu.

Raih Kepercayaan Kalangan Peneliti

Di sisi lain, program yang memacu pendokumentasian penghayat Marapu mendorong para peneliti dan juga pemerhati kebudayaan Sumba tertarik mendukung langkah



Foto: Tangkapan layar <https://www.youtube.com/@liimarapu/videos>

SID. Sejumlah peneliti bekerja sama dengan SID dalam mengupayakan pengarsipan berbagai sumber pengetahuan terkait budaya Sumba. Kini, sudah terkumpul 26 buku karya peneliti dari berbagai pelosok dunia mengenai budaya Sumba yang diterbitkan oleh SID untuk memudahkan akses bagi masyarakat setempat.

Dari 26 terbitan tersebut, 13 di antaranya merupakan karya yang belum pernah dipublikasikan sama sekali. SID dipercaya untuk membantu proses penerbitannya untuk kemudian dicetak dan disebarluaskan kepada masyarakat. Agar seluruh masyarakat dapat menikmatinya, buku-buku ini juga didigitalisasi. Dengan demikian, bagi masyarakat yang memerlukan dapat sewaktu-waktu menyalinnya dari *flashdisk*.

“Kami juga mendapat kiriman dari satu peneliti seorang antropolog dari Amerika Serikat. Dia kasih buku penelitiannya dia dari tahun 1960-an tentang Sumba,” jelas Anto.

Lebih lanjut, Anto mengungkapkan, untuk menyempurnakan berbagai ikhtiar yang dilakukan selama ini, dengan dukungan Voice, ke depan SID dengan pihak terkait bakal membuat *website*. Situs tersebut akan diisi dengan berbagai informasi mengenai budaya Sumba dengan skala besar. Dengan demikian siapapun yang tertarik mempelajari budaya

Sumba, dapat memperoleh informasi secara utuh dan lengkap.

Ke depan, Anto berharap pelestarian budaya di Sumba Timur dapat terus berlanjut. Ia juga mengajak para lembaga adat setempat untuk mengadvokasi pelestarian budaya. Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah setempat berperan aktif dalam melestarikan budaya.

Anto menambahkan, kerja sama dengan Voice selama ini diharapkan juga dapat terus berlanjut. Hal ini, kata dia, akan menunjang pelestarian kebudayaan melalui pendidikan. Ini disebabkan, materi kebudayaan di sekolah-sekolah diminta untuk mengadopsi referensi sekaligus dokumentasi yang telah digagas SID selama ini, serta referensi dari sumber lainnya.

“Harapan saya memang nanti pendidikan kita, khususnya Sumba Timur, sudah bisa memuat tentang budaya Sumba Timur. Karena sangat luas sekali. Kita masih bisa bicara tentang kain dan sebagainya, itu masih banyak budaya Sumba yang masih belum ditelaah,” pungkas Anto.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari <https://indonesiainklusi.id/artikel/tak-berkategori/lii-marapu-melestarikan-budaya-masyarakat-marapu-melalui-pengarsipan-ritual-dan-musik/>



APLIKASI SIMPALD UNTUK SANITASI AMAN DI KABUPATEN PINRANG

Oleh **HALIA ASRIYANI**



Sejak tahun 2015, Kabupaten Pinrang telah berupaya untuk mempercepat pemenuhan sanitasi layak dan aman dengan diadakannya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Keberadaan IPLT ini merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk penyelenggaraan sanitasi aman dalam suatu wilayah. Penyelenggaraan operasional IPLT ini sendiri telah dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPTD PALD) yang berada di bawah naungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (sebelumnya Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR) Kabupaten Pinrang. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa jenis pelayanan SPM pekerjaan umum pemerintah pada kabupaten/kota terdiri atas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Ketersediaan instalasi pengolahan air limbah domestik beserta badan pengelolanya dalam bentuk UPTD pun menjadikan Kabupaten Pinrang selangkah lebih maju dalam upaya percepatan menuju sanitasi aman.

Kabupaten Pinrang terus berbenah untuk percepatan sanitasi aman di wilayahnya. Di tahun 2020, Kabupaten Pinrang menjadi salah satu kabupaten yang mengikuti *Twinning Program* Sulawesi Selatan. *Twinning Program* merupakan sebuah program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas operator air limbah domestik, dengan melakukan kemitraan di antara operator air limbah domestik antar kabupaten/kota. Melalui kegiatan yang digagas oleh FORKALIM (Forum Komunikasi Pengelolaan Air Limbah Permukiman) dan diimplementasikan melalui kerja sama USAID IUWASH, UNICEF dan Yayasan BaKTI, serta difasilitasi oleh Pokja AMPL ini, Kabupaten Pinrang memperoleh pendampingan dalam pengelolaan air limbah domestik. Dari kabupaten yang menjadi mentornya, yaitu Kabupaten Sidoarjo yang telah memiliki pengetahuan, pengalaman dan keberhasilan dalam topik tertentu terkait pengelolaan air limbah domestik, Kabupaten Pinrang berkesempatan belajar secara langsung untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja layanan pengelolaan air limbah domestik. Dengan mengambil tema “Mendesain, Mengoperasikan dan Memelihara IPLT Konvensional”, *Twinning Program* menjadi sarana pembelajaran horizontal oleh Kabupaten Pinrang dengan mentornya yaitu Kabupaten Sidoarjo.



Posisi IPLT yang berada di wilayah hilir akan berfungsi jika lumpur tinja di penampungan atau tangki septik di rumah warga disedot secara periodik lalu diangkut ke IPLT. Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik selanjutnya masih membutuhkan pengolahan di IPLT melalui proses pengolahan fisik, pengolahan biologis atau pengolahan kimia sehingga aman untuk dimanfaatkan atau di buang ke lingkungan. Semua proses dalam ketiga subsistem ini sepatutnya dikerjakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) sehingga pengelolaan lumpur tinja terlaksana sesuai alur pengelolaan sanitasi layak, aman dan berkelanjutan.

Sebagai dukungan peningkatan kapasitas operator PALD, Program WASH (*Water Sanitation and Hygiene*) kerja sama UNICEF dan Yayasan BaKTI bersama dengan Pokja AMPL (Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan) Provinsi Sulawesi Selatan, juga melaksanakan Pelatihan Operator IPLT unit PALD di Sulawesi Selatan. Kegiatan yang didukung BPPW (Balai Prasarana Permukiman Wilayah) Sulawesi Selatan ini berlangsung pada September 2021, diikuti oleh delapan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang telah

memiliki IPLT dan dikelola oleh UPTD PALD setempat, termasuk Kabupaten Pinrang. Dengan berbagai dukungan yang diberikan, serta komitmen Pemerintah Kabupaten Pinrang, kondisi IPLT Malimpung di Kabupaten Pinrang yang sebelumnya tidak beroperasi dengan maksimal karena berbagai keterbatasan, baik secara pengetahuan maupun teknis, pun kini mulai dapat memberikan pelayanan dengan lebih efektif.

Kini, setelah perbaikan kualitas pada layanan UPTD PALD dan pengelolaan IPLT, Pemerintah Kabupaten Pinrang, melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, mulai menyiapkan implementasi sanitasi aman melalui program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT). LLTT merupakan suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik atau terjadwal yang diterapkan pada sistem pengelolaan air limbah setempat, yang kemudian diolah pada instalasi yang diangkut secara aman sesuai tarif retribusi yang telah ditetapkan.

Untuk menyiapkan program LLTT, maka dibutuhkan referensi database air bersih dan sanitasi limbah domestik atau lumpur tinja dari



pelanggan baik rumah tangga, sekolah, kantor maupun sektor swasta lainnya. Dalam mendukung penyiapan *database* tersebut, Kabupaten Pinrang dengan dukungan program WASH kerja sama UNICEF dan Yayasan BaKTI dan Pokja AMPL Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan lokakarya penguatan *database* layanan air limbah domestik bagi UPT PALD di Sulawesi Selatan. Kegiatan yang berlangsung pada November 2021 ini diikuti oleh tujuh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Pinrang. Para peserta berasal dari unsur regulator (Bappeda/Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dan unsur operator (Kepala UPTD PALD dan tim pendataan).

Tidak hanya sampai di situ, karena upaya menuju sanitasi aman sangat perlu untuk melibatkan berbagai pihak termasuk Dinas Kesehatan, maka pelatihan *Inspection Tools* dan Survei Sanitasi Aman bagi sanitarian di Kabupaten Pinrang juga dilaksanakan. Pelatihan *Inspection Tools* dan Survei Sanitasi Aman yang berlangsung pada Juni 2022 ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari para sanitarian yang mewakili seluruh kecamatan dari 17 Puskesmas dan pengelola air limbah domestik di Dinas Bina

Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang. *Inspection tools* atau instrumen inspeksi sanitasi aman yang menjadi materi utama dalam pelatihan dan survei ini berguna untuk mengetahui akses air dan sanitasi, khususnya kondisi tangki septik rumah tangga yang ada di masyarakat. Melalui pelatihan ini, para sanitarian dan pengelola air limbah domestik memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru tentang strategi kolaborasi lintas sektor yang mendukung efektivitas pemantauan dan pelaksanaan sanitasi aman di Kabupaten Pinrang. Selanjutnya, *database* yang telah terkumpul melalui survei ini akan menjadi referensi dalam penyelenggaraan sanitasi aman di Kabupaten Pinrang, termasuk untuk program LLTT.

Tantangan yang harus diatasi oleh Dinas PUPR selanjutnya adalah pengelolaan *database* berbasis daring agar dapat membantu meningkatkan performa manajemen layanan dan operasi layanan di lapangan. Untuk itu, program WASH kerja sama UNICEF dan Yayasan BaKTI memfasilitasi pembuatan aplikasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SIMPALD). Penyediaan aplikasi SIMPALD dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan sanitasi

Navigation

-  Dashboard
-  DATA LLTT ▼
-  DATA LLTTT ▼
-  Calon Pelanggan ▼
-  IPAL Komunal ▼
-  IPLT ▼
-  Sosialisasi IPLT
-  User Account ▲
- Operator Mobile
- Administrator

Operator Mobile

Add +

10 records per page

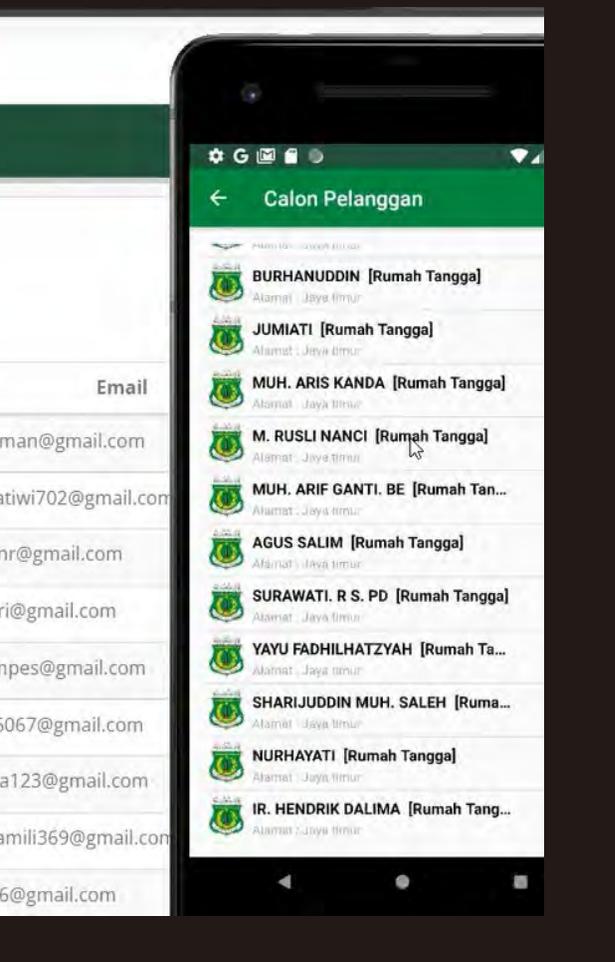
No.	ID Operator	Nama	
1	7315041612990001	ALFIAN RAMADHAN	fianhardi
4	7315044307971005	ANDI PRATIWI	anditapra
7	7315081005000001	MISDAR	mizdar.p
19	7315084107990001	SUKMA	indrisefti
5	7315110511920001	HAMJAH	hamjahin
2	7315110702950003	AMRAN MUTHOHHARI	amrand.6
3	7315114605970002	ANDI ATHIRA	andiathir
18	7471090308850001	SUDARSO	sudarsoja
6	7601021010920002	M.ZULFIKAR	zul12123

aman khususnya pelaksanaan program LLTT. Aplikasi dibuat dalam dua versi yakni versi berbasis *web* yang dapat digunakan oleh pimpinan/pengambil keputusan perencanaan air limbah domestik sebagai sistem monitoring, perencanaan, dan pengelolaan data penyelenggaraan sanitasi aman. Sementara versi lainnya yaitu versi berbasis android yang dapat digunakan oleh tim operator IPLT di lapangan untuk melakukan survei pengumpulan data tangki septik calon pelanggan layanan baik LLTT maupun LLTTT (Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal).

Aplikasi SIMPALD berbasis *web* dapat diakses melalui pald.pinrangkab.go.id. Gambaran *landing page*-nya menampilkan visualisasi peta sebaran sanitasi Kabupaten Pinrang dan memuat beberapa menu penting antara lain; menu LLTT yang memuat sebaran Layanan Lumpur Tinja Terjadwal; menu LLTTT memuat sebaran pelanggan Layanan Lumpur

Tinja Tidak Terjadwal; menu “Calon Pelanggan” yang memuat sebaran rumah tangga hasil survei; menu “IPAL Komunal” sebaran Instalasi Pengolahan Air Limbah yang tersambung ke sejumlah rumah tangga sebagai pengguna dan terdapat menu “*log in*” yang khusus dikelola oleh penanggung jawab aplikasi di manajemen UPTD PALD. Sedangkan versi berbasis Android merupakan versi khusus untuk operator resmi yang namanya telah didaftarkan sebagai enumerator di lapangan.

Pada November 2022, aplikasi ini telah diperkenalkan melalui Pertemuan *Ekspose* dan Sosialisasi aplikasi SIMPALD Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang bersama UPTD PALD Kabupaten Pinrang. Melalui kegiatan ini dilakukan praktik/simulasi penggunaan aplikasi untuk versi berbasis *web* dan Android, termasuk penginputan data hasil survei bagi enumerator atau operator UPTD PALD. Hingga saat ini,



sejumlah 1449 data sudah dapat dilihat dalam aplikasi SIMPALD yang terdiri dari 956 pelanggan LLTT, 417 pelanggan LLTTT, 63 calon pelanggan dan 13 IPAL komunal. Data ini akan terus bertambah seiring dengan gencarnya survei yang dilakukan oleh tim operator IPLT. *Form* yang digunakan untuk mengumpulkan data pelanggan ini direplikasi dari UPTD PALD Kota Makassar telah dilatihkan cara penggunaannya dalam lokakarya penguatan *database* layanan air limbah domestik bagi UPTD PALD sebelumnya. Data yang ada pun akan terus diperbarui sesuai perkembangan. Karena aplikasi ini menyimpan *database* para penyedia dan penerima layanan PALD, maka aplikasi ini dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan di Kabupaten Pinrang dalam menyusun kebijakan berbasis data, khususnya terkait layanan pengelolaan air limbah domestik yang efektif.

Bukan hanya data identitas pelanggan secara rinci yang dapat kita temukan dalam aplikasi ini, namun lokasi rumah hingga foto rumah dan kondisi tangki septik pun dapat diperoleh. Dengan begitu, operator IPLT yang akan melakukan penyedotan dapat mengetahui informasi awal kondisi lokasi di mana penyedotan akan dilakukan dan mempersiapkan peralatan yang diperlukan untuk itu. Ke depannya aplikasi ini akan dirancang pula untuk dapat digunakan oleh pengguna layanan PALD atau masyarakat, agar dapat mengakses layanan penyedotan lumpur tinja melalui aplikasi berbasis Android. Hal ini merupakan sesuatu yang baru di Kabupaten Pinrang, bahkan di Sulawesi Selatan dan akan menjadi pembelajaran bagi kabupaten lainnya yang hendak mengembangkan layanan pengelolaan air limbah domestik di wilayahnya.

Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, mulai dari peningkatan pengetahuan dan kapasitas UPTD PALD Kabupaten Pinrang melalui sejumlah kegiatan seperti Pelatihan Operator IPLT unit PALD, pendampingan survei tangki septik untuk pengumpulan data calon pelanggan bagi operator, lokakarya penguatan *database* layanan air limbah domestik, pelatihan manajemen air limbah domestik bagi regulator dan operator, dan kampanye sanitasi aman melalui dukungan rehabilitasi tangki septik berstandar nasional, maka kini saatnya Kabupaten Pinrang melangkah untuk menyiapkan pengelolaan sistem manajemen air limbah domestik yang lebih mutakhir dan efektif. Kabupaten Pinrang terus berbenah meningkatkan pengetahuan dan memaksimalkan layanan pengelolaan air limbah domestik di wilayahnya. Satu hal yang dapat kita pelajari dari Bumi Lasinrang ini adalah kemauan untuk terus belajar dan komitmen yang kuat untuk perubahan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tentang Program Kerja Sama Unicef - BaKTI dapat menghubungi info@bakti.or.id

SATU DARI EMPAT RUMAH TANGGA DI INDONESIA MENGKONSUMSI AIR MINUM YANG TERCEMAR TINJA

Oleh **DANIEL**

Air minum merupakan kebutuhan penting bagi setiap orang untuk melancarkan pencernaan dan peredaran darah, menjaga tekanan darah, meningkatkan daya otak, dan sejumlah fungsi lainnya.

Masalahnya, masih banyak orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat dan aman. Sebuah data dari riset memperkirakan 400 ribu anak di seluruh dunia meninggal setiap tahun karena penyakit diare akibat mengonsumsi air minum yang tidak aman.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan pemerintah mensyaratkan nol atau tidak terdeteksinya bakteri *E. coli* pada air yang akan dikonsumsi.

Faktanya, riset Kementerian Kesehatan tentang kualitas air minum rumah tangga (SKAM-RT) Indonesia pada 2020 menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan: satu dari empat



Ilustrasi: Ichsan Djunaed/Yayasan BAKTI

rumah tangga mengonsumsi air minum yang tercemar tinja. Studi ini berdasarkan lebih dari 21 ribu sampel air siap minum (*point of use*, POU) yang diambil dari rumah tangga di seluruh Indonesia. Bakteri *E. coli* bersumber dari pengelolaan tinja yang tidak aman.

Di level mikro, riset saya di pedesaan di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa tidak 100% air yang responden minum setiap hari itu diolah. Padahal,



pengolahan mampu menghilangkan tinja pada air minum.

Lalu bagaimana cara mengelola dan menyiapkan air minum yang aman dan sehat?

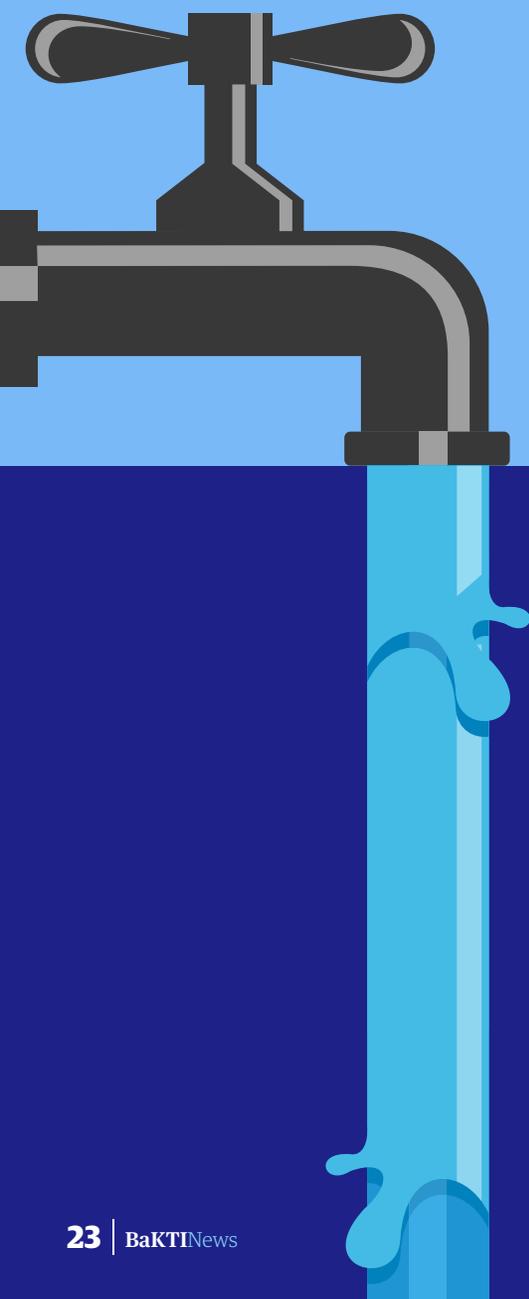
Tiga lapis perlindungan air siap minum

Perlu kita perhatikan bahwa arti air siap minum berbeda dengan sarana air minum (SAM) seperti kran perpipaan, sumur, atau mata air. Air siap minum adalah air yang dikonsumsi oleh

anggota keluarga dan disajikan dalam gelas atau wadah untuk diminum, alias air yang masuk ke tubuh manusia.

Air siap minum bisa saja disimpan dalam cerek, wadah plastik, galon, dan bisa saja sudah diolah ataupun tidak. Singkatnya, kualitas air siap minum menunjukkan kualitas air yang sedang dikonsumsi oleh rumah tersebut.

Air minum yang memiliki risiko rendah terhadap kontaminasi tinja tidak hanya



ditunjukkan dengan hasil pengujian kualitas bebas tinja, tapi juga perlindungan berlapis untuk mengurangi risiko kontaminasi.

Kita sering menyebutnya dengan istilah pengelolaan air minum rumah tangga (PAM-RT). Pada dasarnya, PAM-RT terdiri tiga aktivitas: (1) pengolahan air minum yang benar dan selalu dilakukan, (2) penyimpanan yang aman, dan (3) kondisi dapur atau sekitar wadah penyimpanan air minum yang higienis. Ketiga hal ini untuk memberikan perlindungan berlapis kepada air minum.

Pengolahan air minum yang benar

Pengolahan air minum bertujuan untuk menghilangkan pencemaran tinja pada air minum. Berbagai teknik yang bisa dilakukan antara lain merebus air atau penyaringan.

Pada dasarnya, berbagai pengolahan air minum tersebut efektif menghilangkan kontaminasi tinja asalkan dilakukan dengan benar.

Cara pengolahan air minum yang sering dilakukan di Indonesia adalah melalui perebusan. Lebih dari 60% penduduk Indonesia melakukannya. Tapi pertanyaannya: apakah perebusan dilakukan dengan benar?

Cara merebus air yang benar adalah membiarkan air mendidih sepenuhnya (gelembung udara yang banyak) dan membiarkan api atau pemanas tetap menyala (atau waktu tunggu didih) selama sekitar satu menit. Lalu kita perlu menambah waktu tunggu didih sekitar satu menit untuk setiap penambahan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut (MDPL).

Contohnya, jika ketinggian daerah tersebut adalah 2.000 MDPL, seperti daerah Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, maka kita perlu menunggu waktu didih sekitar 2 menit. Hal itu karena yang membunuh bakteri dan virus berbahaya adalah suhu air yang tinggi. Semakin tinggi ketinggian daerah, titik didih menjadi turun (di bawah 100 derajat Celcius), sehingga walau sudah mencapai titik didih, bakteri dan virus bisa saja tidak sepenuhnya hilang dalam waktu singkat.

Lalu Anda perlu ingat bahwa air panas tidak sama dengan air mendidih. Tidak benar bahwa air panas mampu menghilangkan bakteri dan virus sepenuhnya, tapi air mendidih mampu.



Pemahaman ini perlu diketahui oleh semua masyarakat.

Sayangnya, perebusan air sangat rentan terhadap rekontaminasi, yaitu terjadinya pencemaran kembali.

Rekontaminasi ini biasanya terjadi saat air yang suhunya sudah turun setelah dimasak dipindahkan ke wadah lain yang tidak bersih. Bisa juga air yang sudah mendingin tadi kemudian disaring dengan saringan kain yang tidak bersih.

Praktik penyaringan ini biasanya terjadi di wilayah yang memiliki kadar kapur yang cukup tinggi.

Teknik pengolahan air minum lainnya adalah filtrasi atau penyaringan. Teknik ini umumnya menggunakan produk dasar dari keramik yang didesain sedemikian rupa agar mampu menyaring bakteri dan virus. Produk komersialnya sudah banyak tersedia di pasaran.

Penyimpanan air minum yang aman dan kebersihan dapur

Air yang sudah diolah akan berisiko terkontaminasi kembali jika disimpan dalam wadah yang tidak aman.

Beberapa kriteria wadah yang aman, antara lain memiliki tutup, tidak retak, dan bermulut kecil agar menghalangi kontak langsung antara tangan dan air. Tapi wadah juga harus memiliki lubang yang cukup besar untuk memudahkan pembersihan.

Ingat pula bahwa kita perlu rutin membersihkan wadah penyimpanan air minum dengan sabun. Kita juga bisa membilas bagian dalam wadah dengan air mendidih.

Kondisi kebersihan atau higienitas di sekitar wadah penyimpanan air minum perlu diperhatikan.

Penelitian kami di Nusa Tenggara Timur (NTT) menyimpulkan bahwa pengolahan air minum akan lebih efektif jika dibarengi dengan dapur yang bersih.

Di sana kami menemukan bahwa ada banyak alat atau hewan peliharaan yang sering masuk ke dapur yang kemudian mempengaruhi kualitas air minum. Lantai yang berdebu dan kotor juga bisa mengurangi kualitas air minum.

Kelola air minum dengan benar dan terus menerus

Untuk mendapatkan air minum yang sehat dan aman kita harus rutin mengelola air minum rumah tangga dengan cara yang benar dan terus menerus. Sebab, setiap hari kita butuh air minum. Karena itu, pengelolannya juga harus benar setiap hari.

Air yang tercemar tinja berisiko menyebabkan diare dan penyakit lain pada kita dan anggota keluarga, walau dikonsumsi dalam jumlah sedikit.

Satu studi menunjukkan bahwa jika 10% air yang kita minum itu tidak diolah, maka pada dasarnya kita sedang meminum 90% air mentah. Sedangkan masih banyak orang yang minum air yang tidak selalu diolah.

Kita tentunya berharap angka diare, kematian anak di bawah lima tahun, dan bahkan stunting pada anak-anak di Indonesia akibat mengkonsumsi air yang tidak aman terus berkurang secara signifikan.

Patut diingat, praktik pengelolaan air minum rumah tangga yang benar saja tidak cukup, tapi juga harus terus menerus dilakukan setiap hari.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Dosen Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada
Artikel ini bersumber dari <https://theconversation.com/riset-ungkap-1-dari-4-rumah-tangga-di-indonesia-konsumsi-air-minum-yang-tercemar-tinja-194921>

BERSIAP UNTUK BENCANA

Oleh **REDR INDONESIA**

Indonesia memiliki beragam bencana yang sering terjadi, baik bencana alam maupun non alam. BNPB mencatat di awal tahun 2022 (1 Januari – 21 April 2022) terdapat 1.355 bencana yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi berupa banjir sebanyak 521 bencana. Semua bencana tersebut mengakibatkan lebih dari 1,7 juta orang mengungsi dan 22.217 rumah rusak, belum termasuk fasilitas umum yang rusak sejumlah 587 buah. Selain itu, COVID-19 menjadi bencana pendatang baru.

Pandemi yang masuk kategori bencana non alam ini mengakibatkan banyak korban jiwa di Indonesia sejak kasus pertama kali diumumkan bulan maret 2020. Penularan COVID-19 ini “tak terbendung” dan berisiko tinggi seiring dengan mobilitas manusia yang tinggi. Di sisi lain, bencana lain tak mau kalah unjuk gigi bersamaan dengan penekanan risiko manusia terpapar virus ini. Bencana yang terjadi secara simultan ini memerlukan penanganan komprehensif agar segala penanganan darurat bencana berjalan dengan baik sekaligus menekan risiko penularan COVID-19.

Rangkaian kejadian bencana tersebut memberikan pembelajaran bagi kita agar kita lebih siap untuk mengurangi dampak buruk bencana. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang bertujuan agar menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penyelenggaraan penanggulangan bencana ini meliputi tahapan pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Setiap tanggal 26 April diperingati sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Peringatan ini dicetuskan untuk mengajak semua pihak meluangkan waktu untuk melakukan kesiapsiagaan bencana secara serentak dan untuk membudayakan latihan terpadu, terencana dan berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat menuju Indonesia Tangguh Bencana.



JUMLAH KEJADIAN PER-JENIS BENCANA TAHUN 2022

GEMPA BUMI	28
ERUPSI GUNUNG API	1
KEBAKARAN HUTAN/LAHAN	252
KEKERINGAN	4
BANJIR	1.531
TANAH LONGSOR	634
CUACA ESTREM	1.068
GELOMBANG PASANG & ABRASI	26

DAMPAK KERUSAKAN BENCANA ALAM TAHUN 2022

RUMAH RUSAK TOTAL	95.403	RUMAH RUSAK BERAT	20.205	RUMAH RUSAK RINGAN	51.985	RUMAH RUSAK SEDANG	23.213
FASILITAS RUSAK TOTAL	1.983	FASILITAS PENDIDIKAN RUSAK	1.241	FASILITAS KESEHATAN RUSAK	95	FASILITAS PERIBADATAN RUSAK	647
163 KANTOR RUSAK		342 JEMBATAN RUSAK		TOTAL BENCANA TAHUN 2022		3.544	
UPDATE 31 Desember 2022							

DAMPAK BENCANA ALAM PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2022

MENINGGAL DUNIA	858	HILANG	37	LUKA-LUKA	8.733	MENDERITA & MUNGKINSI	6.144.534
-----------------	-----	--------	----	-----------	-------	-----------------------	-----------

SEBARAN KEJADIAN BENCANA ALAM SEJAK 1 JANUARI - 23 APRIL 2022

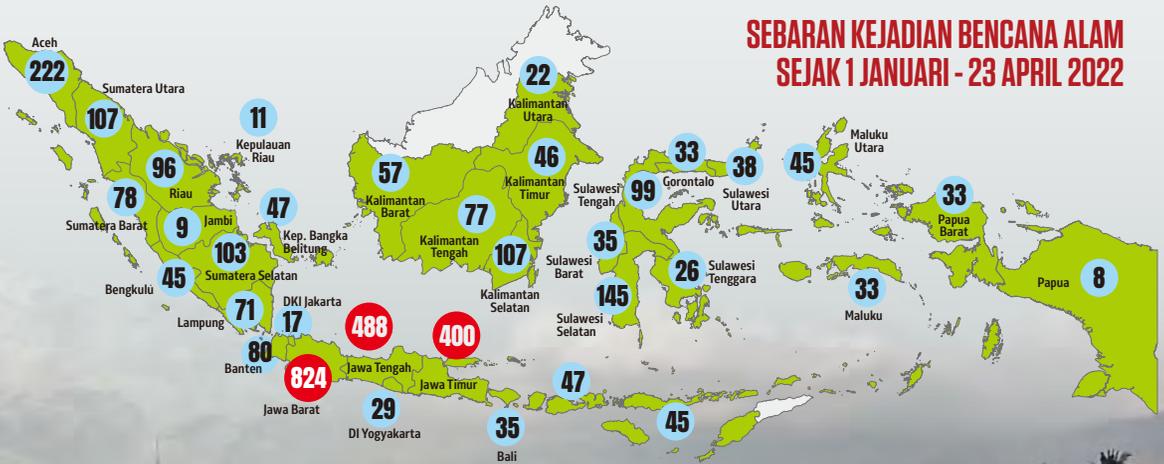


Foto: istimewa



Tangguh bencana harus dimulai dari diri sendiri, masyarakat diharapkan mampu menyelamatkan dirinya sendiri ketika terjadi bencana, maka masyarakat harus memahami ancaman dan risiko yang mereka hadapi di lingkungan sekitar mereka. Hasil survei di Jepang, Great Hanshin Earthquake 1995, korban yang dapat selamat dalam durasi 'golden time' dikarenakan kesiapsiagaan diri sendiri, dukungan anggota keluarga, dukungan teman atau tetangga, dukungan orang di sekitarnya, dan dukungan Tim SAR (Buku panduan HKBN 2017). Berdasarkan hasil kajian tersebut maka faktor yang paling menentukan selamat dari bencana adalah penguasaan pengetahuan diri sendiri, oleh sebab itu peningkatan kesiapsiagaan masyarakat sangat didorong guna mengurangi risiko bencana.

Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2022 merupakan tahun ketiga kalinya dilaksanakannya selama masa pandemi. Adapun tujuan peringatan dari Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun ini adalah meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan bencana seluruh lapisan masyarakat di masa pandemi COVID-19 menuju keluarga tangguh bencana”.

Indonesia memiliki beberapa program baik dari BNPB, dan dinas-dinas lainnya mulai dari pembentukan desa Tangguh Bencana (DESTANA), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), dan terakhir

hingga menyentuh komunitas terkecil dari negara yaitu keluarga dengan membentuk Keluarga Tangguh bencana (KATANA). Selain itu, negara melalui berbagai instansi dan peralatan banyak melakukan kajian, penguatan kapasitas/pengetahuan, serta pemasangan sistem peringatan dini di setiap wilayah yang rawan bencana seperti tsunami, erupsi gunung api, longsor, dan cuaca ekstrim.

Kesiapsiagaan Komunitas

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.

Komunitas juga memiliki juga risiko yang harus mereka hadapi, baik risiko atas manusia, lingkungannya, ekonominya, infrastrukturnya dan sosialnya. Masing-masing memiliki kerentanan dan karakteristik sendiri jika terjadi bencana. Maka untuk mengatasinya diperlukan kesiapsiagaan untuk menekan dampak buruk yang terjadi akibat bencana.

Bentuk kesiapsiagaan komunitas ini memiliki berbagai bentuk mulai dari sosialisasi tentang daerah rawan bencana di lingkungannya,

KOMPONEN KESIAPSIAGAAN KELUARGA

Kekayaan Indonesia tak hanya pada sumber daya alam namun juga pada risiko bencana, hampir seluruh keluarga di Indonesia rawan akan bencana. Untuk itu kesiapsiagaan keluarga perlu ditingkatkan guna menekan dampak buruk dari bencana. Komponen kesiapsiagaan tersebut adalah sebagai berikut.

1 Sistem Peringatan Dini

Tanda peringatan dini dapat dikenali seluruh anggota keluarga termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas baik saat di dalam dan di luar rumah.

2 Rencana Kesiapsiagaan Keluarga

Rencana kesiapsiagaan telah disusun untuk seluruh anggota keluarga termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Setiap anggota keluarga memiliki nomor-nomor kontak anggota keluarga yang lain dan dapat dihubungi saat keadaan darurat.

3 Jalur Evakuasi

- Jalur evakuasi telah ditentukan untuk seluruh anggota keluarga termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
- Jalur evakuasi terbebas dari segala sesuatu yang bisa menjadi penghalang saat digunakan.

pemetaan daerah rawan bencana, penyusunan rencana kontingensi sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, pembuatan peta, rambu dan pembersihan jalur evakuasi, simulasi menghadapi bencana, termasuk pengecekan sirine, simulasi evakuasi, serta pengecekan alat darurat. Komunitas perlu bersiap menghadapi ancaman bencana di manapun, kapanpun dan merespons dengan efektif serta efisien demi menyelamatkan dan mengurangi risiko bencana terhadap aset penghidupan dan kehidupan.

Kesiapsiagaan Keluarga

Dalam situasi bencana tidak ada yang menginginkan keluarganya menjadi korban, atau asetnya terkena dampak bencana. Keluarga menjadi pilar yang menyokong yang akhirnya dapat memberikan dampak kepada komunitas dan masyarakat jika keluarga sudah sadar dan siap menghadapi bencana.

Untuk memberikan seluruh pemahaman tersebut maka penting bagi keluarga untuk mengenali ancaman di sekitar lingkungan rumah atau tempat tinggal, memahami risiko terhadap ancaman tersebut dan meningkatkan kesadaran di setiap anggota keluarga akan bencana, dan pentingnya mengurangi risiko bencana. Dalam keluarga dapat melakukan beberapa hal seperti melakukan pemetaan dan analisis ancaman.

- Jalur evakuasi telah dilengkapi dengan rambu-rambu yang dapat diketahui oleh seluruh anggota keluarga termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

4 Evakuasi Mandiri

Setiap anggota keluarga termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas telah memahami teknik perlindungan diri dan evakuasi.

5 Titik Kumpul

- Titik kumpul telah ditentukan lokasinya.
- Titik kumpul terbebas dari segala sesuatu yang bisa menjadi penghalang saat digunakan.
- Titik kumpul telah dilengkapi dengan rambu-rambu
- Anggota keluarga memahami perannya saat berada di titik kumpul.

Mengetahui mengenai risiko dan ancaman ini dapat dilakukan dengan cara sederhana yaitu dengan mengunduh aplikasi Inarisk Personal kemudian dapat melihat ancaman/risiko bencana di sekitar lingkungan keluarga, kemudian dapat membuat rencana kesiapsiagaan kecil, mulai dari persiapan rencana jalur evakuasi, pengecekan tempat aman, titik kumpul keluarga, dan melakukan simulasi.

Kesiapsiagaan Individu

Hasil survei dari gempa Kobe, Rajib Shaw, 2012, menyatakan bahwa menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Pemerintah Kobe City, 97% dari orang-orang yang diselamatkan dari gempa bumi Hanshin-Awaji menjawab bahwa mereka diselamatkan oleh anggota keluarga mereka atau tetangga, atau menyelamatkan diri, sementara petugas penyelamat mengalami kesulitan untuk menjangkau mereka. Maka kesiapsiagaan dari individu ini perlu ditingkatkan untuk menyadarkan keselamatan bagi anggota keluarganya. Kegiatan dari individu ini bisa berupa penyiapan tas siaga bencana, sosialisasi kepada keluarga mengenai bencana, dan mendorong keluarga untuk bersiap siaga.

Negara, komunitas, keluarga, dan individu perlu bersiap menghadapi ancaman bencana di manapun, kapanpun dan merespons dengan efektif serta efisien demi menyelamatkan dan mengurangi risiko bencana terhadap aset penghidupan dan kehidupan. Hari Kesiapsiagaan Bencana adalah upaya pemerintah untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dan menyadarkan individu akan pentingnya pengetahuan bencana untuk selamat, sehingga kita mampu mengaplikasikan jargon Hari Kesiapsiagaan Nasional yaitu “Siap Untuk Selamat”.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel bersumber dari: <https://redr.or.id/hari-kesiapsiagaan-bencana>



KETIKA PEREMPUAN DARI KASTA BANGSAWAN DAN HAMBA DI SUMBA BERSIASAT MEMUTUS RANTAI PERBUDAKAN

Bagian I

Oleh **MARTHA HEBI**

Sebelas kilogram,” sebut Tamu Rambu Margaretha (71) kepada petugas kesehatan di pos pelayanan terpadu (posyandu) yang berada di salah satu bagian rumahnya.

Hari itu, pertengahan September 2022, ia sibuk mengatur timbangan gantung sambil membantu mengangkat anak batita dan balita yang akan ditimbang.

Sudah 30 tahun Mama Margaretha, ia biasa disapa, mengabdikan sebagai kader posyandu. Selama itu pula, ia aktif memanggil dan menegur para orang tua di Kampung Prailiu, Sumba Timur, yang tidak memeriksakan perkembangan anak mereka di posyandu.



Ilustrasi: Project Multatuli/Sekaijoget

Sebagai perempuan keturunan bangsawan di Kampung Prailiu, Mama Margaretha tidak ingin rantai perbudakan tradisional terus hidup di Sumba Timur.

Perbudakan tradisional masih sangat kental baik di perkotaan maupun pedesaan di Sumba Timur. Di sana, terdapat tiga kasta: *maramba* atau golongan bangsawan, *kabihu* atau golongan merdeka, dan *ata* atau golongan hamba.

Ata biasanya disebut juga dengan *tau la umma*, dari Bahasa Kampera, Sumba Timur, yang artinya orang dalam rumah (hamba). Istilah *kabihu* dalam makna yang lain adalah klan. Ketiga kasta tadi, juga memiliki *kabihu* (klan) masing-masing.

Ata terbagi dalam tiga golongan yakni *ata ngandi*, *ata ndai*, dan *ata pakei*. *Ata ngandi* adalah perempuan hamba yang dibawa oleh perempuan bangsawan saat menikah. *Ata ndai* adalah hamba yang dimiliki secara turun-temurun oleh keluarga bangsawan. *Ata pakei* adalah hamba yang dibeli oleh keluarga bangsawan dari keluarga bangsawan lainnya.

Mama Margaretha, ibu, dan neneknya memiliki *ata ngandi* saat menikah dengan suami mereka. “Mama saya, dia bawa sepuluh orang hamba, satu laki-laki dan sembilan perempuan,” kata Mama Margaretha.

Ibu dari Mama Margaretha, Rambu Padu Jabu, berasal dari Bulubokat, Maradesa, yang saat ini secara administrasi negara masuk ke dalam Kabupaten Sumba Tengah. Ketika menikah, Rambu Padu Jabu tinggal dan menetap di Rakawatu, Sumba Timur, di kediaman sang suami dengan membawa *ata ngandi*-nya.

Menurut penuturan Mama Margaretha, dari sembilan perempuan hamba yang dibawa ibunya, ada satu orang yang akhirnya menjadi *ngara hunga*.

Ngara hunga dalam Bahasa Kampera, Sumba Timur, berarti nama yang muncul. Dalam konteks perbudakan, *ngara hunga* berarti nama seorang bangsawan yang dipakai dan menjadi panggilan keseharian yang mengikuti nama hambanya.

Misalnya, ibu dari Mama Margaretha adalah Rambu Padu Jabu. Nama panggilan kesehariannya adalah Rambu nai Hana (Rambunya Hana) yang artinya perempuan bangsawan yang memiliki hamba bernama Hana.

“Kalau *appu* (nenek Mama Margaretha) dari Lawonda, Sumba Tengah, namanya Rambu Newa. Saya kurang tahu dia bawa hamba berapa dulu. *Ngara hunga*-nya *appu* Rambu nai Lingga,” Mama Margaretha menambahkan.

Sementara itu, Mama Margaretha ketika menikah dengan almarhum suaminya, Tamu Uumbu Ndjaka, ia membawa enam orang hamba. Almarhum suami Mama Margaretha adalah bangsawan yang menjadi tuan di Kampung Raja Prailiu.

Mama Margaretha sebetulnya juga memiliki *ngara hunga*. Namun, ia lebih sering dipanggil dengan namanya sendiri, Rambu Etha atau



Sumber Foto: Project Mitaauli



Sumber Foto: Project Mitaauli

Rambu Margaretha. “Waktu kami menikah, ‘anak-anak dalam rumah’ sudah ikut serta. Kita tidak bisa menolak mereka. Itu budaya kita dulu. Tetapi kita juga harus pikirkan bagaimana masa depan mereka sekarang,” kata Mama Margaretha.

Buku *Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915-1950* karya I Ketut Ardhana (2005) menggambarkan bahwa rantai perbudakan di Sumba Timur sudah ada sejak abad ke-16. Kebanyakan dari mereka adalah anak berusia 8-14 tahun.

Lambat laun, perbudakan menjadi tradisi yang penting untuk dilanjutkan. Selain sebagai tameng untuk melanggengkan tenaga kerja tak berbayar, sejumlah studi juga menyebut kehadiran hamba juga sebagai status sosial seorang bangsawan. Poin terakhir ini yang kemudian menunjukkan betapa pentingnya keberadaan sosok hamba dalam struktur sosial di Sumba.

Pendidikan Sebagai Siasat

Mama Margaretha dan suaminya memiliki prinsip yang keras dalam hal pendidikan anak-anak mereka. Pasangan ini memiliki delapan orang anak dan semuanya menyelesaikan kuliah di Yogyakarta. “Dari SD sampai SMA, semua jalan kaki ke sekolah. Kalau sudah terlambat ke sekolah

baru kami kasih uang bemo. Uang jajan juga kadang saja. Kami juga hidup seperti orang lain,” katanya.

Mama Margaretha melawan stigma yang menyebut keluarga *maramba* pasti hidup dengan mewah. Sebaliknya, menurut Mama Margaretha, mereka juga harus bekerja, bertani, beternak, dan menenun.

Suami Mama Margaretha yang dulu mengurus lahan pertanian dan ternak mereka – sapi, kerbau, dan kuda. Mama Margaretha yang akan mengurus rumah, tenun, dan ternak kecil seperti babi dan ayam. Dari kerja-kerja ini, mereka mampu menyekolahkan anak-anak mereka dan anak-anak dalam rumah.

Mama Margaretha tetap fokus mengurus tenun, selepas kepergian suami pada 2008. Semua urusan pekerjaan suaminya diambil alih oleh anak kelima, seorang laki-laki paling bungsu. Mama Margaret memiliki delapan anak, 3 laki-laki dan 5 perempuan. Dua anak laki-laki paling tua sudah bekerja di tempat lain dan tidak lagi tinggal serumah dengan Mama Margaret.

“Semua yang tinggal di rumah harus sekolah, mau anak kandung, anak-anak dalam rumah, ya, harus sekolah,” kata Mama Margaretha. Ia merasakan betul pentingnya pendidikan dalam membentuk cara berpikir.



Margaretha muda hanya mampu menempuh jenjang pendidikan hingga kelas tiga sekolah menengah pertama. Pada masa itu, keluarga bangsawan tidak menyekolahkan anak-anak perempuannya karena khawatir bertemu jodoh yang bukan dari golongan sama.

“Saya hanya sampai kelas tiga SMP, saya tidak lulus. Kalau mama sampai kelas tiga SR,” kata Mama Margaretha, seraya menjelaskan SR atau Sekolah Rakyat setara dengan SD saat ini.

“Mama keras sekali dulu. Waktu saya kelas satu SD, saya pernah malas-malasan ke sekolah. Saya pake alasan badan lemas karena malam makan nasi jagung dan sayur saja, pagi juga begitu. Aiih, Mama marah, dia suruh saya siap memang ke sekolah. Dia ambil kayu kejar saya.”

“Lalu Mama dari belakang antar saya ke sekolah, kalau saya jalan lambat sedikit kena habok (pukul) dengan kayu. Tapi saya lebih kuat lari,” kisahnya sambil tertawa.

Mama Margaretha mulai menyekolahkan anak-anak dalam rumahnya pada tahun 1980an, ketika itu anak laki-laki keduanya juga mulai memasuki usia sekolah. Situasi ini sangat jarang, karena yang terjadi anak-anak maramba didampingi atau saat berangkat sekolah, bukan a ikut bersekolah.

Kedisiplinan keluarga Mama Margaretha dalam pendidikan juga berlaku bagi para perempuan hamba.

“Bapa (suaminya) sudah siap memang kayu atau rotan. Ini rotan yang biasa pake pukul kuda waktu pacuan. Begitu tahu ada yang tidak pergi sekolah kena *lop* (pukul) sudah. Kalau saya hanya nasehat saja,” kisahnya sambil menyebutkan nama beberapa anak yang pernah “mendapatkan” rotan.

Ia bercerita perempuan hamba di rumahnya rata-rata lulus SD, SMP, SMA bahkan ada yang juga kuliah. Mereka bahkan bebas menentukan pilihan setelah lulus, ada yang jadi pegawai BUMN, ada yang memiliki usaha sendiri, dan ada yang memutuskan untuk pergi keluar Sumba untuk bekerja.

“Waktu Rambu Raing (anak pertama) kuliah ke Yogya, kami juga kasih sekolah satu anak (hamba) ke Kupang. Orang tuanya juga dukung waktu dia kuliah bukan hanya kami saja,” kata Mama Margaretha.

Mama Magaretha menjadi satu dari sedikit keluarga bangsawan yang menyekolahkan hambanya. Tradisi umum yang ada adalah keluarga *maramba* enggan menyekolahkan hambanya karena khawatir mereka menjadi pintar lalu melarikan diri.

Tradisi itu yang ingin diputusnya, salah satunya melalui seni

Saat mewawancarai Mama Margaretha, di samping rumahnya begitu banyak anak-anak yang sedang berlatih menari tradisional, menyanyi beraneka lagu dan bermain permainan anak Sumba.

Rupanya, anak perempuan Mama Margaretha, Rambu Ana mengorganisir anak-anak di Kampung Prailiu lewat berbagai kegiatan seni. Bagi keluarga besar Mama Margaretha, seni mampu menembus batas relasi tuan dan hamba sekaligus membawa anak-anak untuk mengenal budaya mereka.

Hal ini juga didukung menantunya, suami Rambu Ana, yang turut mendukung upaya keluarga untuk mengenalkan tradisi seni kepada generasi muda di Sumba. (Bersambung)

INFORMASI LEBIH LANJUT

Sumber: <https://projectmultatuli.org/ketika-perempuan-dari-kasta-bangsawan-dan-hamba-di-sumba-bersiasat-memutus-rantai-perbudakan/>

PROGRAM REVIEW: PENDEKATAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT

Oleh **JAPAN INITIATIVE, YAYASAN TIFA, & SUNAJI ZAMRONI**





Pembangunan tentu telah menjadi kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Meski demikian, kita mungkin memiliki persepsi yang berbeda tentang pembangunan. Bagi sebagian orang, pembangunan bermakna aktivitas fisik membangun jalan, gedung, jembatan, atau bandara.

Sementara sebagian yang lain melihat pembangunan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk pembangunan, baik untuk membangun infrastruktur fisik maupun pembangunan manusia melalui pendidikan dan peningkatan kapasitas. Sebagian besar pembangunan negara tersebut dibiayai oleh dana yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Sehingga, pemanfaatannya tentu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada warga.

Pemerintah, melalui sejumlah skema partisipasi telah mencoba membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Di tahap perencanaan, dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Sayangnya, ruang partisipasi bagi masyarakat belum terakomodasi dengan baik pada tahapan implementasi maupun evaluasi.

Partisipasi dalam proses evaluasi dalam sistem pembangunan nasional di Indonesia belum memperoleh porsi yang seimbang sebagaimana proses perencanaan dalam sistem pembangunan. Dalam tata pemerintahan saat ini memang telah dikenal berbagai mekanisme evaluasi pembangunan seperti evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), LaKIP, SAKIP, pelaporan LPPD, LKPJ, dan RLPPD yang mestinya memuat berbagai capaian pelaksanaan program-program pemerintah, namun sebagian besar dari mekanisme tersebut masih bersifat teknokratis. Berbeda dengan

perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan secara partisipatoris dan tersistematisasi, proses evaluasi pembangunan yang partisipatif masih jarang dilakukan, atau pelaksanaannya sangat bergantung pada *political will* dari pemangku kepentingan.

Pada tahun 2020 Yayasan Tifa dan Japan Initiative mengkaji dan menyusun pendekatan evaluasi program berbasis masyarakat dengan mengadopsi “Program Review” yang sebelumnya telah dilakukan di Jepang. Konsep “Program Review” di mulai di Jepang pada tahun 2002 sebagai upaya menyeleksi program-program pemerintah untuk menghemat anggaran dan berkembang sebagai pendekatan evaluasi pembangunan yang diadopsi oleh berbagai tingkat pemerintahan secara nasional. Selain itu, Program Review juga ditujukan untuk meningkatkan rasa ‘kepemilikan’ masyarakat atas program-program pembangunan yang berdampak terhadap kehidupan mereka.

Program Review (PR) adalah metode untuk mengevaluasi pelaksanaan dan hasil-hasil yang dicapai sebuah program yang menggunakan anggaran pemerintah. Serangkaian kegiatan dilakukan untuk menilai relevansi, efektivitas, serta efisiensi program pemerintah menurut masyarakat dan pegawai pemerintah. Program Review juga diartikan sebagai metode evaluasi pembangunan berbasis masyarakat yang prosesnya terbuka dan melibatkan banyak pihak. Metode Program Review digunakan untuk mengetahui bentuk, isi, makna, dan kondisi program pemerintah melalui proses diskusi terbuka yang melibatkan masyarakat.

Metode ini telah dipraktikkan oleh 145 pemerintah daerah di Jepang sejak tahun 2002. Agar dapat melanjutkan bisnis di tengah persaingan pasar antar produk, maka dibutuhkan pengecekan pada rantai produksinya untuk meningkatkan mutu dan kinerja biaya/*cost performance*. Karena itu, untuk meningkatkan mutu program pemerintah dan *cost performance* pada situasi anggaran yang terbatas, perlu dan

penting dilakukan pengecekan melalui metode seperti Program Review ini.

Hasil dari Program Review adalah penilaian dan keputusan secara tegas atas kelanjutan dari program yang dievaluasi. Suatu program bisa direkomendasikan untuk dilanjutkan, diperbaiki, diganti pelaksanaannya, atau dihentikan. Program yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah satuan terkecil dari kebijakan yang dijalankan pemerintah. Misalnya program pengadaan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan fasilitas publik, konstruksi jalan, dan irigasi. Ada pula program pemberdayaan masyarakat seperti program beasiswa pendidikan, pemberdayaan perempuan, bantuan UMKM, dan pelatihan lainnya. Melalui program tersebut, diharapkan pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkualitas dan efisien meski dengan anggaran yang terbatas. Program seperti ini dapat lahir dari kepemimpinan kepala daerah serta pegawai pemerintah (PNS) yang berdedikasi baik.

Di sisi lain, program tersebut harus dipahami dan diterima secara baik oleh masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya evaluasi program dengan metode PR yang pelaksanaannya dilakukan melalui proses diskusi secara terbuka dengan masyarakat, tujuannya agar diperoleh program yang ideal. Tindak lanjut hasil *Program Review* akan terlihat dalam dokumen perencanaan program di tahun anggaran berikutnya.

Di Jepang, tidak ada kekuatan hukum yang mengikat tentang tindak lanjut ini, maksudnya, jika Pemda atau DPRD mengabaikan hasil PR, maka mereka tidak akan mendapat sanksi secara hukum. Akan tetapi, keputusan hasil Program Review ini dilakukan secara terbuka di depan masyarakat, sehingga tentu menjadi perhatian penting bagi mereka yang hadir. Inilah nilai prestisius yang diandalkan Program Review. Oleh sebab itu, tidak heran jika 73 persen hasil PR di Jepang ditindaklanjuti ke dalam proses perencanaan program berikutnya. Dengan kata lain, Program Review memiliki nilai prestisius tersendiri bagi pemerintah Jepang karena proses dan hasil evaluasinya dilakukan dan diputuskan secara terbuka.

Pelaksanaan Program Review

Program Review dapat dilakukan melalui tatap muka langsung dan dapat pula disiarkan secara langsung melalui aplikasi berbasis internet. Dalam prosesnya, diskusi PR ini tidak mereview semua program pemerintah, namun hanya program tertentu saja yang sebelumnya telah dipilih oleh kepala daerah dan panitia pelaksana. Pelaksanaan diskusi juga dibatasi hanya sekitar 1 jam untuk setiap program. Tempat pelaksanaan, aturan, dan alur proses diskusi sudah dipersiapkan sedemikian rupa serta dilakukan secara runut.

Salah satu kelebihan metode Program Review adalah menghadirkan pendapat (mata pengawasan) dan cara pandang dari pihak lain (kacamata pihak luar) dalam suatu forum diskusi. Hal ini sebelumnya tidak ditemukan pada diskusi internal yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Kehadiran serta pemikiran dari para ahli dan praktisi dari luar penyelenggara program ini akan memberikan sudut pandang dan penilaian terkait program. Karena tenaga ahli dan praktisi ini merupakan orang yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan langsung di lapangan.

Selama ini di Jepang, warga yang berbicara di forum diskusi (rasio berbicara di forum) rata-rata sekitar $\pm 4,7\%$, sementara di negara lain, Jerman misalnya, warga yang berbicara di dalam forum rata-rata $\pm 5,0\%$. Jika dilihat secara khusus di antara warga perempuan penilai di Jepang, terutama setelah tahun 2018, rata-rata rasio angkat tangan sudah lebih dari 40% dari total peserta yang hadir dalam diskusi. Selain memberikan manfaat pada bentuk partisipasi masyarakat secara nyata, ada beberapa manfaat nyata lainnya yang dihasilkan oleh metode Program Review. Salah satu manfaat yang menonjol adalah terpangkasnya anggaran belanja program yang dinilai sebagai pemborosan. Metode menilainya adalah memilah program yang tidak efisien secara anggaran, atau tidak diperlukan oleh masyarakat. Manfaat tersebut penting disampaikan sebagai pembelajaran berharga bagi siapapun, baik dari pengalaman praktik PR di daerah maupun di nasional.

Program Review telah dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai salah satu upaya untuk menyehatkan birokrasi dan pengelolaan pembangunan serta keuangan di Jepang. Setelah melalui proses diskusi dengan berbagai pihak termasuk perwakilan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia, akhirnya terwujudlah buku Program Review: Pendekatan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat. Implementasi Program Review di Indonesia dan memperkenalkan metode Program Review kepada publik dan khususnya pemerintah di Indonesia, dari tingkat pusat, daerah, hingga desa.

Program/kegiatan pemerintah desa menggunakan dana yang bersumber dari APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Masyarakat desa berhak untuk mengetahui dan berkepentingan agar kebutuhan publiknya dipenuhi oleh pemerintah desa melalui penyelenggaraan program/kegiatan di desa. Mekanisme yang memungkinkan untuk memenuhi aspek ini, salah satunya adalah melibatkan diri dalam proses evaluasi pembangunan desa. Tentu keterlibatan pada tahap lainnya sangat relevan dan sama pentingnya, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan desa. Dalam konteks inilah model Program Review yang telah berhasil dipraktikkan di Jepang, penting diujicobakan ke desa-desa di Indonesia.

Karena bersifat uji coba, sudah tentu pedoman teknis ini masih terbuka untuk memperoleh masukan dan koreksi ketika ada ketidaksesuaian di lapangan. Pada masa depan, berpijak pada hasil uji coba pedoman teknis ini dan masukan atas materi muatan pedoman ini, akan digunakan selanjutnya sebagai pedoman penyelenggaraan Program Review di pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan pemerintah pusat. Pada pelaksanaan Program Review di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota misalnya, Bappeda mengambil peran lebih sebagai penyelenggara Program Review, membentuk panitia pelaksana untuk pelaksanaan review atas program-program dari berbagai dinas atau OPD.

Seperti di Jepang contohnya, lembaga setara Badan Perencana Pembangunan (BAPPEDA) melakukan *review* atas program-program yang dilakukan oleh dinas lain karena Badan Perencana Pembangunan dianggap sebagai lembaga yang lebih objektif dibandingkan jika *review* dilakukan oleh dinas pelaksana terkait. Panitia pelaksana dibentuk oleh Badan Perencana Pembangunan dan dikepalai oleh kepala daerah untuk mempersiapkan program Review termasuk mempersiapkan *form* lembar informasi program. Sementara untuk pengisian lembar informasi program dilakukan oleh masing-masing dinas pengampu program.

Selanjutnya pada saat pelaksanaan kegiatan, perwakilan masing-masing dinas atau pengampu program hadir dalam Program Review untuk memberikan presentasi kepada warga penilai dan evaluator serta menjawab berbagai pertanyaan evaluator terkait program.

Pelibatan masyarakat dalam Program Review ini harus memberikan afirmasi kepada kelompok warga rentan dan marginal (perempuan, difabel, warga miskin). Afirmasi ini bisa melalui keterlibatannya sebagai evaluator (bagi yang memiliki kompetensi yang sesuai), warga penilai yang dipilih berdasarkan asas perwakilan, dan peserta yang hadir secara langsung maupun mengikuti jarak jauh.



INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca buku **Program Review: Pendekatan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat** melalui Batukarinfo.com

TANTANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PASCA PANDEMI COVID-19

Oleh **RUDY M. HARAHAP**



Sejak 2013-2021 total Dana Desa yang dikucurkan telah mencapai 400 triliun rupiah untuk seluruh desa di Indonesia. Namun, jumlah dana yang dikucurkan tersebut ternyata belum mampu untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Karenanya, pemerintah terus meneguhkan hati mengawal pengelolaan keuangan desa. Hal ini dimaksudkan agar proses pembangunan desa lebih akuntabel, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, hal ini penting karena desa adalah ujung tombak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang dimulai dari desa.

Di samping itu, dengan pengakuan di regulasi atas rekognisi dan subsidiaritas, desa kini memiliki peran utama dalam mengelola, memberdayakan, dan memajukan sumber daya

yang tersedia di desa, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Oleh karena itu, pergerakan roda pembangunan desa harus diiringi dengan kesadaran akan spirit rekognisi dan subsidiaritas tersebut, terutama bagi penggerak warga desa dan para pemangku desa.

Tantangan Tata Kelola dan Akuntabilitas Desa

Karena pentingnya pengelolaan keuangan desa pasca pandemi COVID-19 dalam mendorong kemandirian desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga telah mengevaluasi tata kelola dan akuntabilitas desa.

Sebagai contoh, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, teridentifikasi beberapa isu penting, yaitu bagi hasil atau dividen BUMDes rendah, ketidakmandirian keuangan desa, dan penurunan desentralisasi fiskal desa.

Selain itu, Laporan Pertanggungjawaban APBDes dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak dibuat dan disampaikan ke Pemerintah Kabupaten dan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) tidak dioperasikan secara *online*.

Kemudian, Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) belum digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai alat audit atau pengawasan keuangan desa.

Tantangan Kepala Desa

Kepala Desa juga mempunyai tugas yang berat dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Mereka dituntut mampu mengelola anggaran Dana Desa yang besar. Sebagai contoh, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memperoleh alokasi anggaran Dana Desa sekitar 122 miliar rupiah tahun 2022.

Itu sebabnya, para kepala desa harus meningkatkan terus kapasitas dan pengetahuannya dengan berbagai metode, seperti mengikuti pelatihan ataupun bimbingan teknis, termasuk meningkatkan sumber daya manusia aparatur desa.

Hal tersebut akan mengungkit kapasitas dan kemampuan kepala desa dan aparatur desa dalam mengarungi kancah manajemen dan tata kelola, baik terkait pemerintahan, keuangan, maupun aset desa.

Pengetahuan terkait manajemen dan tata kelola akan membantu kepala desa dalam menghadapi realitas di lapangan yang kompleks. Sebagai contoh, para kepala desa di hulu sungai tengah Kalimantan Selatan ternyata dituntut berperan nyata dalam menjaga pelestarian lingkungan, seperti terlibat dalam aksi protes atas kegiatan penambangan PT. Mantimin Coal Mining di Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan beberapa tahun lalu.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan pun turut mendukung aksi protes tersebut dengan mencanangkan program 'Geopark Meratus' dan 'Save Meratus'. Sebab, Pegunungan Meratus memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan lebih jauh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan desa.

Pegunungan Meratus memiliki keanekaragaman hayati yang potensial bagi pengembangan

sektor wisata, baik wisata alam, wisata budaya Dayak Meratus, maupun wisata tirta.

Hasil nyatanya adalah dipilihnya Desa Nateh sebagai lokasi peringatan Hari Sungai sedunia. Desa Nateh dikenal memiliki spot arung jeram dan wisata lainnya, bahkan potensinya tidak kalah dengan wisata tirta di negara lain.

Tantangan BUMDes

Untuk menggali potensi desa, desa juga telah diarahkan oleh pemerintah untuk membentuk badan usaha berupa BUMDes. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa.

Sayangnya, dalam skala nasional, realitasnya BUMDes menghadapi beberapa isu strategis, seperti kedudukan BUMDes di desa dipandang sebagai pesaing ketimbang mitra UKM dan Koperasi, pembentukannya bukan karena peluang bisnis yang nyata, rendahnya efisiensi, dan terbatasnya kapasitas operasional BUMDes. Selain itu, keberadaannya masih dianggap sebagai fungsi pelayanan umum dan status badan hukum belum terpenuhi sebagaimana mestinya.

Secara umum, hingga saat ini juga masih dijumpai beberapa kelemahan yang memerlukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, seperti: penggunaan Dana Desa belum sesuai dengan prioritas, pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa belum sesuai dengan ketentuan, inventarisasi Aset Desa belum dilakukan, dan pelaksanaan tata kelola dan pengamanan aset desa oleh perangkat desa belum memadai.

Kelemahan-kelemahan tersebut juga diperparah dengan penyalahgunaan Dana Desa yang berujung tindak pidana korupsi. Sebagai contoh, kasus penyalahgunaan Dana Desa pernah terjadi pada Desa Damithulu di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa dengan indikasi kerugian negara sebesar tak kurang dari 872 juta rupiah pada tahun anggaran 2019.

Kasusnya, terdapat beberapa item pekerjaan yang disalahgunakan oleh pelaku, seperti kemahalan harga (*mark up*) kegiatan, kekurangan volume pekerjaan, hingga kegiatan yang diduga fiktif.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa masih dipahami secara keliru oleh kepala desa sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau mengganti biaya kepala desa dalam kontes pemilihan kepala desa yang mahal, sebagaimana halnya dengan pemilihan kepala daerah.

Pengelolaan Pasca Pandemi COVID-19

Perilaku penyalahgunaan tersebut sangat bertolak belakang dengan kondisi sosial saat ini yang menunjukkan jumlah penduduk miskin desa meningkat pasca pandemi COVID-19.

Kepala Desa ternyata tidak menggunakan Dana Desa untuk menciptakan program/kegiatan yang dapat mengatasi isu-isu kemiskinan di desa, terutama pada pemulihan pasca Pandemi COVID-19 saat ini.

Penggunaan Dana Desa juga belum diarahkan untuk memacu kemandirian Pemerintah Desa dalam menggali pendapatan desa dengan memanfaatkan potensi desa. Hal ini menimbulkan ketergantungan desa yang terus-menerus terhadap pendapatan transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat dan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah.

Hal tersebut harus menjadi perhatian bagi semua Pemerintah Desa dalam menyusun program/kegiatan saat tahap perencanaan. Mereka harus lebih cermat dan memperhatikan hasil serta manfaat yang ingin dicapai. Selain itu, program/kegiatan yang disusun harus selaras dengan kebijakan dan kondisi sosial ekonomi desa saat ini dan ke depan, yaitu mampu meredam kenaikan tingkat kemiskinan pasca Pandemi COVID-19.

Sebagai contoh, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri tahun 2019 berkisar 16.000 jiwa. Sayangnya, malah terdapat kenaikan penduduk miskin dari tahun 2020 ke tahun 2021, yaitu dari 15.470 menjadi 16.770 jiwa. Artinya, Dana Desa belum berhasil meredam kenaikan tingkat kemiskinan di desa, terutama pasca COVID-19.

Padaahal, Pemerintah telah menetapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan di desa

pasca pandemi COVID-19 dengan menggunakan Dana Desa, yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 yang dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021.

Mengatasi hal itu, rencana aksi yang harus dilakukan adalah pembaruan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan kebijakan dan peraturan Pemerintah Pusat terbaru dan peningkatan sosialisasi Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Aset Desa.

Selain itu, harus dilakukan inventarisasi Aset Desa yang dipantau oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pemberian teguran atau sanksi kepada Kepala Desa yang melakukan pengeluaran kas desa di luar ketentuan, dan memastikan para Camat cermat dalam melakukan verifikasi penggunaan Dana Desa dalam APBDes.

Selain itu, Inspektur Daerah juga harus memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi Dana Desa dan lebih mengefektifkan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dengan bantuan aplikasi Siswaskeudes.

Hal ini akan meminimalkan risiko terjadinya kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait Dana Desa di lapangan. Inspektur Daerah juga harus memberikan bimbingan dan konsultasi agar penggunaan Dana Desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Intinya, para pemimpin yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa harus berani untuk terus melakukan inovasi, menulis ulang pedoman dan aturan, sehingga desa bisa diandalkan sebagai garda terdepan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama yang berada di desa-desa. Tata kelola tidak boleh dipahami hanya untuk mematuhi peraturan atau standar, tetapi governansi harus terus direvisi dan ditingkatkan kualitasnya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

<https://birokratmenulis.org/tantangan-pengelolaan-keuangan-desa-pasca-pandemi-covid-19>



DISKUSI ONLINE LIVE

Instagram Story @infobakti



Klik BAIK Menaklukkan Tantangan dengan Inovasi

Klinik Inovasi Kesehatan atau disingkat KLIK Baik. Sebuah terobosan baru untuk terus membangun budaya inovasi di kalangan birokrasi khususnya dalam naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan.

Bagaimana kehadiran KLIK Baik mampu mendukung kinerja bidang kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang prima?



Lidi Melintasi Negeri

Presiden Direktur CV Coco Mandar Indonesia di usia 22 tahun sukses tembus pasar internasional dengan bisnis sapu lidi. Tidak tanggung-tanggung Sadaria mengekspor 25 ton sapu lidi dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat ke India. Ya sapu lidi, produk yang selama ini mungkin saja dianggap tidak punya nilai jual ternyata bisa laku di pasar internasional dan berhasil membuka lowongan kerja baru di desanya.

Selengkapnya kunjungi <https://www.instagram.com/infobakti/channel>

Podcast BASUARA



Gotong Royong Pertanian untuk Kesejahteraan Bersama

Vestanesia, sebuah *start up* yang memfokuskan diri pada pengembangan usaha pertanian, peternakan dan perikanan melalui konsep *sociopreneurship* yang membuka ruang partisipasi bagi semua pihak untuk terlibat dalam usaha pertanian. Suatu sistem pertanian yang berbasis digital dan pengembangan teknologi informasi, melalui prinsip gotong royong, mensejahterakan dan berwawasan lingkungan.



Menabung Sampah Plastik Saset di Beta Bank Sampah

Beta Bank Sampah berdiri sejak maret 2018, fokus dari Beta Bank Sampah ini adalah untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan sekitar dan terus mengedukasi orang-orang untuk hidup bijak dalam penggunaan plastik. dengan nasabah yang sebagian besar adalah anak-anak lingkungan daerah Wailete, Hative Besar, Kota Ambon.

Podcast BASUARA (BaKTI Pu Suara) adalah tempat berbagai cerita yang memberi inspirasi, memperkaya pengetahuan dari beberapa narasumber yang berkompeten untuk mendorong meningkatnya kreativitas masyarakat dalam menjawab tantangan pembangunan.

Kunjungi Podcast Basuara melalui <http://bit.ly/basuara>

Artikel

Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas belum mendapat tempat di masyarakat. Kehadirannya masih dipandang sebelah mata. Keterbatasan yang dimiliki, membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya dan hanya perlu mendapatkan belas kasihan. Hak-hak mereka sebagai manusia seringkali diabaikan. Mulai dari hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan hingga hak kemudahan mengakses fasilitas umum.

Padahal Undang-undang Dasar UUD 1945, sudah dengan tegas menjamin para penyandang disabilitas. Setidaknya dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 45, menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

■ <https://www.batukarinfo.com/komunitas/articles/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas>

Publikasi Terbaru



Panduan Reses Partisipatif dan Inklusif - Edisi Revisi

Program INKLUSI (Kemitraan Australia Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) Yayasan BaKTI dan mitranya mengembangkan Reses Partisipatif dan Inklusif. Metode reses ini, selain bersifat partisipatif, juga berperspektif kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Reses Partisipatif dikembangkan oleh Yayasan BaKTI sejak tahun 2015 melalui Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), dan telah diujicobakan serta diimplementasikan di Parepare, Ambon, Kendari, Mataram, Lombok Timur, Maros, Tana Toraja, Belu, Manado, Bengkulu, dan Sleman. Prinsip-prinsip inklusif kemudian ditambahkan sebagai pengembangan dari metode Reses Partisipatif mulai tahun 2022.

■ <https://www.batukarinfo.com/referensi/panduan-reses-partisipatif-dan-inklusif-edisi-revisi>

Berita Terbaru

Optimalkan Potensi Kemaritiman Indonesia dalam Visi RPJPN 2025-2045

Untuk mendukung proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Kementerian PPN/Bappenas terus berupaya menjangkau masukan dari para stakeholders, mitra pembangunan, dan perguruan tinggi. Fokus perencanaan jangka panjang kali ini adalah memaksimalkan potensi kemaritiman Indonesia untuk mencapai negara maritim yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. “Kita perlu mengoptimalkan karakteristik utama wilayah Indonesia, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar yang dikelilingi lautan, yaitu dua per tiga dari total wilayah Indonesia, untuk kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Seminar Penjangkauan Masukan Visi RPJPN 2025-2045: Negara Maritim yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan di Gedung Bappenas.

■ <https://www.batukarinfo.com/news/optimalikan-potensi-kemaritiman-indonesia-dalam-visi-rpjpn-2025-2045>